

**PENGALIHAN HAK PERWALIAN KEPADA WALI HAKIM
MELALUI *HAND PHONE* DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Kantor KUA Kecamatan Rangsang Barat
Kabupaten Kepulauan Meranti)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Melengkapi Tugas-Tugas
Guna Memperoleh Gelas Sarjana Syariah (S.Sy)
Pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



OLEH :

**ABDUL SYUKUR
10621003705**

PROGRAM STRATA SATU

**JURUSAN AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2013**

ABSTRAK

Penelitian berjudul **“Pengalihan Hak Perwalian Kepada Wali Hakim Melalui *Hand Phone* Ditinjau Menurut Hukum Islam”** (Studi Kasus Kantor KUA Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti). Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yang dilaksanakan di Kantor KUA Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. Dari kebanyakan observasi yang dilakukan peneliti menemukan bahwa akad perkawinan yang dilaksanakan, pihak wali menyerahkan hak perwaliannya kepada wali hakim. Pengalihan hak perwalian terjadi setelah pihak KUA menghubungi orang tua atau wali dari calon pengantin, terutama calon pengantin perempuan melalui HP.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu: 1) Apakah faktor-faktor yang melatar-belakangi terjadi pengalihan hak perwalian kepada wali hakim dalam perkawinan di KUA Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti; 2) Bagaimana ketentuan akad pengalihan hak perwalian yang diterima oleh pihak KUA Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti; 3) Bagaimanakan tinjauan hukum Islam terhadap pengalihan hak perwalian kepada wali hakim di KUA Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.

Subjek dalam penelitian ini adalah pasangan suami isteri yang melakukan akad perkawinan. Sementara objek penelitiannya adalah pengalihan hak perwalian kepada wali hakim di KUA Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 26 orang, dengan menggunakan teknik *total sampling*. Dengan demikian sampel dalam penelitian ini berjumlah 26 orang. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer, dan sekunder. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, angket, dan wawancara. Sementara teknik analisa data adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan jalan mengklasifikasikan data-data yang dikumpulkan di lapangan berdasarkan persamaan jenis. Kemudian data tersebut dianalisis dan diuraikan secara gamblang sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

Setelah dilakukan penelitian tentang pengalihan hak perwalian kepada wali hakim melalui telephone atau HP di KUA Kecamatan Rangsang Barat, sehingga ditarik kesimpulan bahwa: 1) Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadi pengalihan hak perwalian dalam perkawinan di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti, yakni karena faktor menghormati pemimpin, faktor takut dan khawatir salah dalam melfalkan ijab dan qabul, dan faktor ekonomi, orang tua menderita sakit; 2) Upaya yang dilakukan pihak KUA ketika orang tua tidak hadir dan tidak menjadi wali dalam perkawinan anaknya, yakni menanyakan kepada pasangan calon pengantin tentang ketidakhadiran orang tua atau wali, kemudian pihak KUA menghubungi orang tua dari kedua pasangan calon pengantin melalui via HP atau telephone tentang alasan tidak hadir dalam akad perkawinan tersebut. 3) Dalam perspektif hukum Islam pihak KUA Kecamatan Rangsang Barat tidak melakukan sesuatu yang melanggar ketentuan hukum Islam, akan tetapi pelanggaran tersebut hanya dilakukan oleh pasangan calon suami isteri.

MOTTO

Dalam harapan
Engkau membayarnya dengan doa
Dalam kebanggaan
Engkau membayarnya dengan tangisan
Dalam kerinduan
Engkau membayarnya dengan keikhlasan
Engkaulah bidadari utusan Allah untukku
Menyimpan keresahan dalam senyuman
Ibunda....

(By. Poernayrita)

AYAHNDA

Aku tak mampu mengantar kepergianmu
Langit mendung turut berduka
Orang-orang riuh rendah bercerita
Tentang segala amal kebaikanmu
Kepergianmu mengajarku
Bagaimana harus mencintai dan menyayangi
Bagaimana harus tulus berkorban dan bersabar
Bagaimana harus berjuang demi anak-anaknya
Hingga saat terakhir hayatmu
Engkau terus berdoa demi kebahagiaan anak-anakmu
Hari ini aku menemuimu, ayah
Lewat sebaith puisi untuk mengenangmu
Bila datang saatnya nanti
Kan kuceritakan segala kebesaran dan keagunganmu
Bersama embun fajar kemarau ku sertakan doa
Semoga engkau mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya
Ayah,
Kami merindukanmu

(By. Penulis)

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah atas petunjuk dan ridho-Nya, dengan segala kerendahan hati karya kecil ini persembahkan kepada:

- Kedua bidadariku Ayahnda M.said Wasidi (alm) dan Ibunda Siti Afsah, yang tiada mampu aku bayarkan pengorbanan mereka, khusus untuk Ibunda yang selama ini berperan sebagai Ibu sekaligus Ayah. Terima kasih atas doa dan perjuanganmu, terima kasih telah menjadi Ibuku.
- Kepada saudara-saudaraku, M. Efendi, S.Kom, Siti Raudah, Abdul Wahid, SH, Zulkarnain, Irwadi, Amd.Kep, Putri Mahdewi, Amd.Ak. Ketulusan mereka memberi dukungan dalam suka dan duka, serta mengajarkan kegigihan menggapai impian. Semua bermula dari mimpi dan usaha jalan mewujudkan.
- Buat sahabat-sahabatku, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih kebersamaan kita dalam berbagi wawasan, terima kasih telah mengajar hidup bersosial, mudah-mudahan persahabatan ini tetap kekal.
- Almamater UIN SUSKA RIAU.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang memberikan taufik dan hidayah-Nya serta nikmat yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis sampaikan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad saw, yang merupakan seorang pejuang sejati yang telah membawa ummatnya dari kehidupan yang penuh kebodohan sampai kepada kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan akhlak mulia sebagaimana kita rasakan sekarang.

Dengan izin Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Pengalihan Hak Perwalian Kepada Wali Hakim Melalui *Hand Phone* Ditinjau Menurut Hukum Islam” (Studi Kasus Kantor KUA Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti)**. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana lengkap strata satu (S1) pada Jurusan Akhwal al-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Pekanbaru.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak baik itu secara langsung maupun tidak langsung, baik itu secara moril maupun materil. Karena itu pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Teristimewa buat kedua orang tua tersayang yang telah memberikan semangat, dorongan serta do'a untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir Karim selaku Rektor UIN Suska Riau beserta staf-stafnya.
3. Yang terhormat Bapak DR. H. Akbarizan, MA. M.Pd, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum beserta Pembantu Dekan I, II, III dan staf atau karyawan Fakultas Syari'ah.

4. Yang terhormat Ketua Jurusan Bapak Drs. Yusran Sabili, M. Ag dan Sekretaris Jurusan Bapak Drs. Zainal Arifin, MA yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Terima kasih kepada Bapak Drs. Zainal Arifin, MA selaku pembimbing skripsi, yang telah membimbing dan mengarahkan skripsi penulis.
6. Kepada keluarga besar penulis Ayahanda, Ibunda, dan sanak saudara
7. Tidak lupa kepada teman-teman seperjuangan Jurusan Akhwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga amal kebaikan yang diberikan kepada penulis mendapat imbalan pahala yang setimpal dari Allah SWT, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat buat kita semua. *Amin ya Robbal 'alamin.*

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pekanbaru, 24 September 2013

Penulis

ABDUL SYUKUR
10621003705

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
MOTO.....	ii
PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Pembahasan	9
 BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KUA KECAMATAN RANGSANG BARAT KABUPATEN MERANTI	
A. Sejarah KUA Meranti	11
B. Visi dan Misi	14
C. Kepegawaian	15
D. Struktur Organisasi	16
 BAB III : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Perkawinan	20
1. Pengertian Perkawinan	20
2. Syarat dan Rukun Perkawinan.....	23
B. Tinjauan Umum tentang Wali Perkawinan	26
1. Pengertian Wali	26
2. Dasar Hukum Wali Nikah	31
3. Syarat-syarat Wali Nikah.....	33
4. Macam-macam Wali.....	35

BAB IV	: PENGALIHAN HAK PERWALIAN KEPADA WALI HAKIM MELALUI <i>HAND PHONE</i> (HP) DI KECAMATAN RANGSANG BARAT KABUPATEN MERANTI	
	A. Faktor-faktor yang melatar-belakangi terjadi pengalihan hak perwalian kepada wali hakim dalam perkawinan	42
	B. Ketentuan akad pengalihan hak perwalian yang diterima oleh pihak KUA	54
	C. Tinjauan Hukum Islam.....	67
BAB V	: KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN	
	A. Kesimpulan	80
	B. Saran-saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Peningkatan dan Penurunan Angkat Perkawinan.....	14
Tabel 4.1	Pengalihan hak perwalian kepada wali hakim merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan masyarakat	42
Tabel 4.2	Pengalihan hak perwalian dalam perkawinan merupakan suatu kebiasaan secara turun temurun sejak dahulu	43
Tabel 4.3	Masyarakat melakukan pengalihan hak perwalian dalam perkawinan.....	44
Tabel 4.4	Wali Nasab tidak memenuhi syarat sebagai Wali dalam Perkawinan.....	47
Tabel 4.5	Faktor ketidak-mampuan wali dalam melakukan ijab dan qabul pada saat akad perkawinan berlangsung	49
Tabel 4.6	Faktor perkawinan yang ingin dilangsungkan tanpa dihadiri oleh orang tua, terutama orang tua dari pihak perempuan.....	51
Tabel 4.7	Faktor Ekonomi Keluarga.....	53
Tabel 4.8	Sikap KUA ketika akad perkawinan yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh orang tua	58
Tabel 4.9	Upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Rangsang Barat dalam memastikan tidak hadirnya orang tua dalam akad perkawinan.....	59
Tabel 4.10	Izin wali dalam perkawinan melalui via telephone atau HP berpeluang terjadinya praktek penipuan	61
Tabel 4.11	Wali melakukan akad perkawinan ulang setelah mengetahui akad perkawinan yang tidak mendapat izin dari orang tua atau wali.....	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Struktur Organisasi KUA Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Meranti	17
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) dan pasal 2 ayat (2) tentang perkawinan yang menetapkan sebagai berikut:

"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan, perundang-undangan yang berlaku".²

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dipahami bahwa perkawinan bagi seorang muslim dianggap sah ketika dicatat oleh pihak berwenang, yakni Kantor Urusan Agama (KUA). Menurut hukum Islam, sahnya perkawinan harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat yang berlaku, di antaranya wali dalam perkawinan.

Wali dalam perkawinan merupakan syarat sahnya suatu perkawinan. Suatu perkawinan dianggap tidak sah, ketika tidak adanya wali, terutama bagi calon pengantin perempuan. Pentingnya wali dalam perkawinan, sebagaimana hadits Nabi SAW yang berbunyi:

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Surabaya: Pustaka Tinta Emes, 1990), h. 2.

² *Ibid.*

وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ)

Artinya: “Dari Abu Burdah Ibnu Abu Musa, dari ayahnya Radliyaallaahu

'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda:

"Tidak sah nikah kecuali dengan wali." Riwayat Ahmad dan Imam

Empat.³

Hadits ini dinilai shahih oleh Ibn Ma'in, Abu 'Awânah dan Ibn Hibban. Al-Hâkim berkata, “Hadits ini sesuai dengan syarat yang ditetapkan asy-Syaikhân (al-Bukhariy dan Muslim), kemudian diperkuat oleh Ibn 'Adiy dan dinilai Hasan oleh at-Turmudziy. Hadits ini juga dinilai Shahîh oleh Ibn al-Jawziy, akan tetapi beliau menyatakan bahwa terdapat ‘*illat*, yaitu al-Irsâl akan tetapi Imam al-Baihaqiy menguatkannya dan membantah *statement* Ibn al-Jawziy tersebut. Maka berdasarkan hal ini, hadits di atas kualitas isnadnya adalah hasan.⁴

Berdasarkan dalil di atas, jelaslah bahwa keberadaan wali dalam perkawinan suatu keharusan, terutama wali bagi perempuan dalam suatu perkawinan melambangkan bentuk persetujuan atau izin atas perkawinan yang dilaksanakan. Izin atau persetujuan tersebut ada berbentuk lisan dan tulisan, sebagaimana dalam hadits Rasulullah SAW dan Undang-Undang RI No. 1 tentang Perkawinan.

³ Al-Hafizh Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, (Tasik Malaya: Persis, 2010), h.

⁴ *Ibid.*

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (2) dan (3) tentang perkawinan ditetapkan beberapa syarat perkawinan, sebagai berikut:

“Bagi laki-laki disyaratkan harus berumur sekurang-kurangnya 18 tahun, sedangkan perempuan berumur 15 tahun. Untuk dapat mengikat diri dalam perkawinan bagi anak yang belum mencapai usia dewasa harus memperoleh izin terlebih dahulu dari kedua orang tua (pasal 6 ayat 2); bilamana di antara kedua orang tua telah meninggal dunia lebih dahulu atau berada dalam keadaan tidak mampu menyetakan kehendaknya, maka izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup (pasal 6 ayat 3).”⁵

Berdasarkan pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) di atas, realitas ditemukan bahwa adanya laki-laki dan perempuan yang melangsungkan akad perkawinan tanpa menghadirkan orang tua sebagai wali dalam perkawinan. Perkawinan dilaksanakan setelah pihak KUA Kecamatan Rangsang Barat memeriksa dan memastikan berkas yang diserahkan terlebih dahulu. Dari berkas yang diserahkan adanya satu persyaratan yang harus dilengkapi, yakni surat izin dari kedua orang tua. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan pihak KUA Kecamatan Rangsang Barat:

“Perkawinan antara laki-laki dan perempuan dapat dilakukan setelah memasukkan berkas yang berisi persyaratan administrasi perkawinan ke Kantor KUA Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. Dari berkas yang telah diserahkan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, dengan tujuan untuk menghindari berbagai hal yang tidak diinginkan dan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam undang-undang perkawinan.”⁶

Berdasarkan ketetapan di atas, diketahui bahwa setelah berkas diserahkan kepada pihak KUA, adanya ketentuan lain yang ditetapkan. Berdasarkan PP No. 9 Tahun 1975 pasal 3 ayat 2, ditetapkan bahwa

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Op. Cit, h. 3.

⁶ Mukhlis (KUA Kecamatan Rangsang Barat), wawancara, tanggal 5 Desember 2011.

perkawinan dapat dilakukan setelah 10 hari sejak berkas diserahkan. Dalam hal ini pihak KUA mengumumkan dan menyebutkan dengan jelas nama, pekerjaan dan tempat tinggal terakhir dari pasangan calon suami dan calon isteri.⁷

Di samping itu, waktu 10 hari setelah berkas diserahkan, pihak KUA Kecamatan Rangsang Barat melakukan pemeriksaan dan memastikan berkas yang diserahkan oleh pasangan calon suami dan isteri. Dari pemeriksaan tersebut, ditemukan bahwa orang tua dari kedua calon suami dan isteri tidak bisa hadir dalam perkawinan, yang menyebabkan terjadi peralihan hak perwalian kepada wali hakim.

Sebelum peralihan hak perwalian kepada wali hakim terjadi, pihak KUA terlebih dahulu menghubungi orang tua (wali) dari kedua pasangan calon suami dan isteri melalui HP (*hand-phone*), terutama calon isteri; karena orang tua (wali) dari kedua calon suami dan isteri tidak bisa hadir dalam perkawinan. Tindakan menghubungi orang tua (wali) yang dilakukan oleh pihak KUA dalam rangka memastikan izin tertulis yang diberikan. Dengan kepastian izin tertulis, pihak KUA memintai persetujuan atau izin dari orang tua (wali) atas peralihan hak perwalian kepada wali hakim.⁸

Menurut KUA Kecamatan Rangsang Barat, ada beberapa faktor yang menyebabkan orang tua (wali) dari kedua pasangan calon suami dan isteri tidak hadir dalam perkawinan, yaitu: pertama, orang tua sedang sakit keras, yang tidak memungkinkan baginya untuk hadir pada saat akad perkawinan:

⁷ Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 62.

⁸ Mukhlis (KUA Kecamatan Rangsang Barat), *wawancara*, tanggal 5 Desember 2011.

Kedua, kondisi ekonomi yang dimiliki orang tua yang tidak mampu dan tidak memiliki dana untuk datang perkawinan tersebut, karena tempat yang harus didatangi orang tua membutuhkan biaya besar, sementara orang tua memiliki ekonomi kurang mampu.⁹

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut ke dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Pengalihan Hak Perwalian Kepada Wali Hakim Melalui *Hand Phone* Ditinjau Menurut Hukum Islam” (Studi Kasus Di Kantor KUA Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti).**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilaksanakan lebih terarah dan sampai kepada sasaran yang diinginkan, penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini, tentang pengalihan hak perwalian kepada wali hakim dalam perkawinan melalui HP (*hand phone*) yang dilaksanakan di Kantor KUA Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah faktor-faktor yang melatar-belakangi terjadi pengalihan hak perwalian kepada wali hakim dalam perkawinan di KUA Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti?

⁹ Mukhlis (KUA Kecamatan Rangsang Barat), wawancara, tanggal 5 Desember 2011.

2. Bagaimana ketentuan akad pengalihan hak perwalian yang diterima oleh pihak KUA Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti?
3. Bagaimanakan tinjauan hukum Islam terhadap pengalihan hak perwalian kepada wali hakim di KUA Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar-belakangi terjadi pengalihan hak perwalian kepada wali hakim melalui HP di KUA Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.
- b. Untuk mengetahui ketentuan akad pengalihan hak perwalian yang diterima oleh pihak KUA Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.
- c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pengalihan hak perwalian kepada wali hakim melalui HP di KUA Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai kontribusi pemikiran dengan harapan dapat menambah pembendaharaan wawasan tentang peralihan hak perwalian kepada wali hakim melalui HP di KUA Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.
- b. Sebagai informasi atau bahan masukan bagi mahasiswa atau para pembaca Kajian tentang peralihan hak perwalian dari orang tua kepada wali hakim melalui HP di KUA Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.

- c. Sebagai karya tulis dalam memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Syari'ah pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E. Metode dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor KUA Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti . Adapun lokasi ini menjadi target penulis, karena permasalahan yang penulis teliti sesuai dengan permasalahan di lapangan. Disisi lain, alasan penulis memilih KUA Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai lokasi dalam penelitian karena penulis sendiri pernah menghadiri akad perkawinan pasangan calon pengantin yang keduanya mendapatkan izin dari wali melalui HP; dengan izin tersebut melatar-belakangi terjadi peralihan hak perwalian kepada wali hakim.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pasangan suami isteri yang melakukan akad perkawinan di Kantor KUA Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun objek dalam penelitian ini adalah pengalihan hak perwalian kepada wali hakim di KUA Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian yang diteliti. Populasi sebagai kumpulan atau agregasi dari seluruh elemen-elemen atau individu yang merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian¹⁰.

¹⁰ Syamsul Hadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 45.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik populasi yang ada. Bila populasi besar, dan penulis tidak mungkin mempelajari semua yang ada dari populasi tersebut. apa yang dipelajari dari sampel, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili)¹¹.

Populasi dalam penelitian ini adalah pasangan suami isteri yang melakukan akad perkawinan dengan persetujuan orang tua melalui *hand phone*. Karena jumlah populasi dalam penelitian ini kecil, maka dalam pengambilan sampel penelitian, penulis menggunakan teknik *total sampling*, yakni teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Dengan demikian sampel dalam penelitian ini berjumlah 26 orang.

4. Sumber Data

- a. Data Primer, adalah data yang penulis kumpulkan secara langsung dari lapangan, atau data yang diperoleh dari hasil angket dan wawancara.
- b. Data Sekunder, adalah meliputi segala informasi yang diperlukan untuk menyusun data-data berdasarkan penelitian baik berupa konsep, definisi, ataupun teori-teori yang dapat dipergunakan untuk menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini berupa data-data yang diambil dari Kantor KUA Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.

¹¹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 91.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian, dengan cara mengamati berbagai aktivitas yang berkaitan dengan proses atau akad perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan suami isteri melalui *hand phone*.
- b. Angket, adalah teknik yang digunakan dengan cara membuat daftar pertanyaan dan disertai pilihan jawaban, kemudian daftar pertanyaan tersebut diajukan kepada responden yang melaksanakan perkawinan dengan memperoleh izin dari wali melalui *hand phone*.
- c. Wawancara, yaitu menanyakan langsung kepada responden yang sifatnya mengarahkan dan mengingatkan masyarakat atau responden tentang objek kajian penelitian, berupa data-data yang diperoleh melalui tanya jawab secara langsung dengan responden dengan pertanyaan yang bersifat terarah dan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.

6. Analisis Data

Data yang telah dikumpul dianalisa dengan menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif, yaitu dengan jalan mengklasifikasikan data-data yang dikumpulkan di lapangan berdasarkan persamaan jenis. Kemudian data tersebut dianalisis dan diuraikan secara gamblang sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih tersistematisnya penelitian perlu diadakan Sistematika Penelitian agar arah dan tujuan penelitian jelas. Oleh karena itu sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika pembahasan.
2. Bab kedua, merupakan bab gambaran umum tentang KUA Kecamatan Rangsangan, terdiri dari sejarah, visi misi, program kerja, struktur organisasi.
3. Bab ketiga, tentang tinjauan pustaka; menguraikan tinjauan tentang perkawinan dan tinjauan tentang wali dalam perkawinan, terdiri dari pengertian perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, pengertian wali, dasar hukum wali nikah, Syarat-syarat Wali Nikah, dan Macam-macam Wali.
4. Bab Keempat, bab pembahasan tentang pengalihan hak perwalian kepada wali hakim melalui *hand phone* (HP) terdiri dari: Faktor-faktor yang melatar-belakangi terjadi peralihan hak perwalian kepada wali hakim dalam perkawinan di KUA Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti; Ketentuan akad peralihan hak perwalian yang diterima oleh pihak KUA Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti; Tinjauan hukum Islam terhadap peralihan hak perwalian kepada wali hakim di KUA Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.
4. Bab kelima, bagian kelima dari penelitian ini berisikan tentang Kesimpulan dan serta saran-saran.

BAB II
GAMBARAN UMUM TENTANG KUA
KECAMATAN RANGSANG BARAT KABUPATEN MERANTI

A. Sejarah KUA Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Meranti

Kecamatan Rangsang Barat merupakan salah satu daerah integral yang terletak di Kabupaten Meranti Propinsi Riau. Sebelum terjadinya pemekaran Kecamatan Rangsang Barat sebelumnya merupakan salah satu bagian dari Kecamatan Rangsang dan merupakan daerah integral Kabupaten Bengkalis. Namun, pada tahun 2002 terjadi pemekaran daerah Kabupaten Bengkalis, hal inilah yang melatarbelakangi berdirinya Kabupaten Meranti.

Berdasarkan undang-undang, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembentukan kabupaten baru, di antaranya jumlah kecamatan yang berada di bawah naungan kabupaten baru. Sehingga Kecamatan Rangsang dibagi menjadi beberapa kecamatan, di antaranya Kecamatan Rangsang Barat. Hal ini terjadi pada bulan Agustus 2002.¹

Dengan berdirinya Kecamatan Rangsang Barat yang merupakan kecamatan baru dan merupakan daerah integral dari Kabupaten Meranti menuntut untuk berdirinya berbagai perangkat yang melengkapi, di antaranya Kantor Urusan Agama (KUA). Oleh karena itu, sejak Agustus 2002 sampai 2004 menjadi dasar dari berdirinya Kantor KUA Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Meranti.

¹ Mukhlas (KUA Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti), *Wawancara*, 11 Maret 2013.

Kemudian, berdasarkan Keputusan Menteri Agama (MA) Nomor 18 Tahun 1975 telah diatur tentang susunan organisasi dan tata kerja Departemen Agama di berbagai daerah di Indonesia. Departemen Agama (Depag) tersebut adalah lembaga yang bernama Kantor Urusan Agama (KUA) di setiap wilayah kecamatan. Kantor tersebut memberikan bimbingan dan pelayanan pernikahan dan persoalan agama lainnya². Dapat dipastikan bahwa sebelum keluarnya keputusan menteri agama ini telah ada suatu lembaga yang bertugas untuk melayani kepentingan umat Islam. Namun, organisasi ini belum terorganisir dengan baik.

Sebelum adanya lembaga resmi pemerintahan untuk mengurus berbagai kepentingan umat Islam tersebut, terutama yang berhubungan dengan masalah perkawinan, semua kegiatan dilaksanakan di masjid-masjid, dimana pernikahan itu berlangsung atau ditempatkan calon mempelai berada. Adapun yang menjadi petugas pernikahan tersebut adalah para *qodhi* yang telah ditunjuk oleh pemerintah.

Seiring dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 18 Tahun 1975 tersebut, maka dikukuhkanlah pembentukan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Sebelum berdirinya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rangsang Barat, telah ada suatu lembaga yang khusus mengatasi masalah pernikahan dan persoalan agama lainnya di kecamatan ini. Lembaga tersebut bernama Majelis Agama Negeri (MAN) yang berdiri pada tahun 1950-an.³

² Depag RI, *Susunan dan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, 1980), h. 198.

³ Darwison (Kepala KUA Kecamatan Rangsang Barat), *wawancara*, 16 Maret 2011.

Di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Meranti terdapat 13 desa. Dalam membantu terlaksananya program KUA ditugaskan P3N dalam pelaksanaan dan memimpin akad perkawinan. Namun, dari ke-13 desa yang ada di bawah Kecamatan Rangsang Barat, yaitu 1) Desa Bantar; 2) Desa Anak Setatah; 3) Desa Segomeng; 4) Desa Lemang; 5) Desa Sialang Pasung; 6) Desa Sungai Cina; 7) Desa Melai; 8) Desa Bina Maju; 9) Desa Sendaure; 10) Desa Kedabu Rapat; 11) Desa Tanah Merah; 12) Desa Kayu Ara; dan 13) Desa Sode.

Dari ke-13 desa yang ada di bawah kekuasaan Kecamatan Rangsang Barat, di mana hanya tujuh desa yang ditugaskan P3N dalam membantu tugas dan fungsi KUA itu sendiri. Sementara desa lainnya secara letak, berdekatan dengan Kantor KUA, sehingga ketika ingin melangsung akad perkawinan, dapat langsung mendatangi Kantor KUA Kecamatan Rangsang Barat. Di antara desa diperbantukan P3N, adalah: 1) P3N Desa Tanah Merah, 2) P3N Desa Sempian, 3) P3N Desa Kayu Ara dan Desa Sode, 4) P3N Desa Melai, 5) P3N Desa Bina Maju, 6) P3N Desa Sendaure; 7) P3N Desa Bokor

Di samping itu, berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor KUA Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Meranti, di mana dalam lima tahun terakhir sejak tahun 2008 hingga 2012 terdapat 1.532 pasangan pengantin yang melangsungkan akad perkawinan di KUA Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Meranti, untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.1. Data Peningkatan dan Penurunan Angka Perkawinan

No	Tahun	Angka Perkawinan	% Peningkatan & Penurunan
1	2008	333	-
2	2009	321	12%
3	2010	306	15%
4	2011	309	-3%
5	2012	263	46%

Sumber: Data Kantor KUA Kecamatan Rangsang Barat, 2008 - 2012

Berdasarkan data dalam tabel di atas diketahui bahwa angka perkawinan yang terjadi di masyarakat Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Meranti dalam lima tahun terakhir di lingkungan Kantor KUA Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Meranti, bersifat fruktuatif. Meskipun secara umum dari data dalam tabel di atas angka perkawinan mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Kemudian, dari tabel di atas diketahui bahwa penurunan angka perkawinan dari tahun 2008 hingga 2012 dapat dilihat dari tahun 2008 sampai 2010, sementara pada tahun 2011 mengalami peningkatan, selanjutnya kembali pada tahun 2012 kembali mengalami penurunan.

B. Visi dan Misi

Visi merupakan target atau tujuan yang ingin dicapai oleh suatu instansi atau lembaga. Dalam mewujudkan target dan tujuan tersebut, sehingga direncanakan beberapa tahapan atau langkah dalam mewujudkannya, yakni misi.

Adapun visi yang dicapai oleh KUA Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Meranti, adalah:

“Terwujudnya masyarakat Islam Kecamatan Rangsang Kabupaten Meranti yang taat menjalankan ajaran agama serta memiliki sumber daya manusia yang berkualitas”

Sementara misi KUA Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Meranti, adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat (keluarga) terutama kepada pasangan calon pengantin sebelum melangsungkan akad perkawinan
2. Melakukan pembinaan dan bimbingan kepada
3. Memberikan bimbingan (konseling) kepada keluarga yang bermasalah sebelum melakukan perceraian

C. Kepegawaian

Untuk mengetahui pendidikan pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Meranti dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel Tingkat Pendidikan
Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangsang Barat
Kabupaten Meranti**

No	Pendidikan	Responden	Persentase
1	Strata Satu (S1)	3	30%
2	SMU / MA sederajat	7	70%
Jumlah		10	100%

Sumber : *Kantor Urusan Agama Kec. Rangsang Barat, Tahun 2011*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 10 orang pegawai KUA Kecamatan Rangsang Barat, dimana 3 orang pegawai berpendidikan sarjana (S.1) dengan persentase 3% (persen), dan SMU/MA sederajat berjumlah 7 orang dengan persentase 70% (persen). Dari tabel di atas, dapat dipahami mayoritas pegawai di KUA Kecamatan Rangsang Barat berpendidikan SMU/MA.

D. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Rangsang Barat

Dalam Suatu organisasi, perlu adanya struktur organisasi yang jelas yang dapat diartikan sebagai suatu kerangka yang menunjukkan seluruh kegiatan organisasi, agar setiap yang dicita-citakan organisasi yang telah ditetapkan dalam organisasi dapat dicapai dengan semaksimal mungkin dan memperoleh suatu hasil yang sangat membanggakan serta memuaskan.

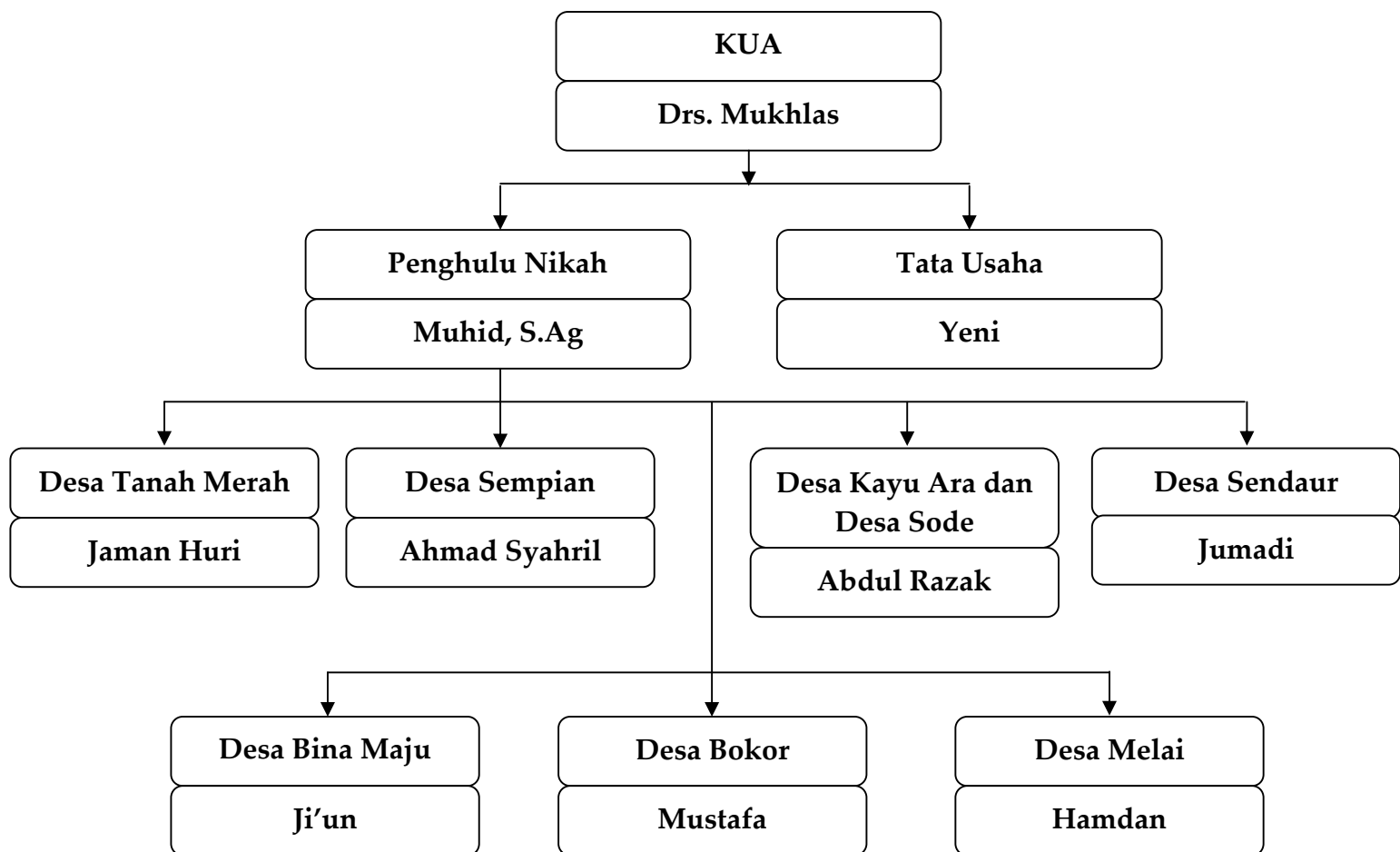
Struktur organisasi juga merupakan suatu gambaran yang skematis yang ditunjukkan oleh garis-garis menurut kedudukan atau jenjang yang telah ditentukan, sehingga dengan adanya struktur organisasi dapat mencerminkan hubungan-hubungan kerja antar tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing orang atau bagian dalam organisasi. Dengan demikian, pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik, karena apa yang dikerjakan telah tergambar dalam struktur organisasi.

Dengan adanya struktur organisasi, para pelaksana tugas (pekerja) akan lebih mudah mengetahui siapa yang menjadi pimpinanya, mulai dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi dalam organisasi. Di sisi lain, dengan adanya struktur organisasi pembagian kerja setiap bidang yang digelutinya jelas, sehingga para pekerja mudah mengetahui apa yang menjadi tanggung jawabnya.

Struktur organisasi merupakan suatu aturan yang mengatur pembagian tugas pegawai, sehingga pegawai yang terstruktur dalam organisasi dapat mengetahui tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan. Di sisi lain, dengan adanya struktur organisasi tersebut, seorang pemimpin akan mudah mengetahui dan mengontrol bawahannya dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang telah diamanahkan.

Untuk mengetahui struktur organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Meranti, dapat dilihat dari gambar berikut :

**Struktur Organisasi KUA
Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Meranti**



Sumber: Kantor KUA Kecamatan Rangsang Barat, tahun 2012

Berdasarkan gambar di atas, terlihat jabatan dari masing-masing komponen di Kantor KUA Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Meranti. Dari masing-masing jabatan tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:

1. Kepala KUA

Kepala KUA Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Meranti bertugas sebagai berikut:

- a. Memimpin dan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan program yang direncanakan
- b. Memberikan penyuluhan dan bimbingan (konseling) kepada pasangan calon pengantin seminggu sebelum dilangsungkan akad perkawinan
- c. Memimpin pelaksanaan akad perkawinan
- d. Menjadi wali (wali hakim) pernikahan, ketika orang tua mempelai perempuan tidak bertindak sebagai wali dari ijab dan qabul
- e. Mengeluarkan dan menandatangani buku pernikahan dari masing-masing pasangan suami isteri.

2. Penghulu Nikah

Penghulu nikah memiliki tugas, sebagai berikut:

- a. Membantu Kepala KUA dalam memimpin terlaksananya akad perkawinan,
- b. Menjadi wali (wali hakim) pernikahan, ketika orang tua mempelai perempuan tidak bertindak sebagai wali dari ijab dan qabul

3. Tata Usaha

Tugas Tata Usaha (TU), yaitu:

- a. Mencatat dan membukukan surat masuk dan keluar
- b. Mengumpulkan data tentang pasangan calon pengantin yang ingin melangsung akad perkawinan
- c. Memastikan keabsahan persyaratan administrasi dalam perkawinan.

4. P3N

P3N bertugas sebagai berikut:

- a. Membantu Kepala KUA dalam memimpin terlaksananya akad perkawinan sesuai wilayah (desa) yang ditugaskan,
- b. Menjadi wali (wali hakim) pernikahan, ketika orang tua mempelai perempuan tidak bertindak sebagai wali dari ijab dan qabul

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Perkawinan

1. Pengertian perkawinan

Istilah perkawinan menurut Islam disebut *nikah* atau *ziwaj*. Kedua istilah ini dilihat dari arti katanya dalam bahasa Indonesia ada perbedaan, sebab kata 'nikah' berarti hubungan seks antar suami-istri sedangkan 'ziwaj' berarti kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam hubungan suami-istri untuk mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadah kebaktian kepada Allah SWT.

Menurut Ibrahim Hosen, nikah menurut arti asli dapat juga berarti aqad, dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti lain ialah bersetubuh, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i.¹ Sementara pengertian nikah dapat juga dilihat dari firman Allah SWT yang artinya:

“Dialah yang menciptakan kamu dari satu zat dan daripadanya Dia menciptakan istrinya agar Dia merasa senang” (TQS al-A'raaf [7]: 189).

Jadi, menurut Al Qur'an, Perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (*sakinah*), pergaulan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan saling menyantuni (*rahmah*).²

¹ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah dan Rujuk*, (Jakarta: Ihya Ulumuddin, 1971), h. 65.

² Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1974), h. 47.

Sebelum melangsungkan perkawinan bagi calon suami-istri benar-benar bersedia melanjutkan hidup sebagai pelaksanaan perintah Allah SWT yang dicantumkan dalam Al-Quran. Dan menurut bentuknya Islam mewujudkan susunan keluarga sebagai suami-istri yang diridhoi Allah SWT melalui ikatan perjanjian (*aqad*) bernilai kesucian/sakral rohaniah dan jasmaniah. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT, yang artinya:

“Kawinlah beberapa perempuan yang kamu sukai, dua atau tiga dan empat, tetapi jika kamu takut bahwa kamu tidak bisa berlaku adil, maka kawinlah seorang saja” (TQS. An-Nisaa’ [4]: 3)

Dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 disebutkan bahwa: “perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan galidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah suatu kesepakatan atau perjanjian antara pria dan wanita yang mengikatkan dirinya dalam hubungan suami istri agar dapat menghalalkan hubungan kelamin guna mendapatkan keturunan dan mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadah kebaktian kepada Allah SWT yang disertai dengan hak dan kewajibannya masing-masing.

Hilman Hadikusuma, SH dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perkawinan Indonesia” mengatakan bahwa perkawinan menurut Hukum Agama Islam adalah perikatan antara wali perempuan (calon istri) dengan calon suami, bukan hanya perikatan antara pria dan wanita saja sebagaimana

yang dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Kristen. Dengan adanya wali dalam perkawinan menunjukkan bahwa ikatan perkawinan dalam Islam berarti pula perikatan kekerabatan bukan hukum perikatan perorangan.³

Didalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata tidak terdapat suatu definisi tentang perkawinan, akan tetapi di dalam Pasal 26 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama dan dijelaskan juga bahwa undang-undang hanya memandang perkawinan dari sudut hubungannya dengan hukum perdata yang artinya terlepas dari peraturan-peraturan yang ada dalam suatu agama tertentu.

Perkawinan menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata lebih bersifat materialistis individualistis sebab lebih dititikberatkan pada perbuatan hukum yang diakibatkan oleh adanya suatu perkawinan dan hubungan perdatanya saja. Dalam hal perkawinan hanya dipandang dari segi keperdataannya saja, maka apabila dalam melaksanakan perkawinan telah terpenuhinya ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata maka perkawinan tersebut dapat dianggap sah tanpa memperdulikan lagi hukum agama masing-masing pihak dari perkawinan merupakan urusan pribadi dari pihak-pihak yang melakukan perkawinan tanpa melibatkan pihak lainnya.

Negara dan bangsa Indonesia mempunyai kepentingan untuk turut serta mencampuri masalah perkawinan. maka pemerintah telah membentuk suatu undang-undang tentang perkawinan yang bersifat unifikasi dalam

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 11.

lapangan hukum perkawinan. Undang Undang Perkawinan ini diberi nama UU No. 1 Tahun 1974 yang disahkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 telah memberikan pengertian tentang perkawinan yang berlaku untuk semua golongan warganegara dan masyarakat di seluruh Indonesia.

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Maha Esa maka perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama atau kerohanian. Perkawinan tidak boleh berunsurkan lahir atau jasmani saja, tetapi harus memiliki unsur batin atau rohani, sebab religiusitas adalah salah satu pilar pokok bagi terciptanya, kelurusan, kebahagiaan, kekelanjutan sebuah keluarga, masyarakat dan negara.⁴

2. Syarat dan Rukun Perkawinan

a. Syarat Perkawinan

Yang dimaksud dengan syarat, adalah segala sesuatu yang telah ditentukan dalam hukum Islam sebagai norma untuk menetapkan sahnya perkawinan sebelum dilangsungkan. Menurut R. Abdul Djamali, ada enam syarat yang perlu dipenuhi seseorang sebelum melangsungkan perkawinan, yaitu: 1) Persetujuan kedua belah pihak tanpa paksaan; 2) Dewasa; 3) Kesamaan agama Islam; 4) tidak dalam hubungan nasab; 5) tidak ada hubungan sepersusuan (*rodho'ah*); 6) tidak semenda (*mushoharoh*).⁵

⁴ R. Soetoyo Prawiro Hamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1988), h. 43.

⁵ R. Abdul Djamali, *Op. Cit*, h. 79-81.

Selain syarat yang dikemukakan di atas, maka ada syarat-syarat khusus bagi seorang wanita yang nantinya akan menjadi ibu rumah tangga sesaat setelah melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat khusus itu adalah:

- 1) Pihak pria tidak boleh mempunyai istri lebih dari empat orang ketika akan melangsungkan perkawinan. Kalau pria itu telah beristri 4 orang, maka perkawinan yang ke 5 tidak sah.
- 2) Perkawinan poligami tidak boleh dirangkap antara istri yang masih ada hubungan darah dengan calon istri berikutnya, seperti kakak beradik dalam bersamaan menjadi istri-istri seorang pria.
- 3) Tidak ada perceraian “li’an”, artinya antar suami-istri terdahulu tidak bercerai karena sumpah sebagai akibat suami menuduh istri berbuat serong atau tuduhan istri bahwa suami berbuat serong. Kalau tuduhan tidak terbukti dan tidak mempunyai saksi lengkap, maka penyelesaian tuduhan terhadap para pihak harus bersumpah sebanyak empat kali dan sumpah yang kelima dilakukan dengan memohon kutukan bagi yang berbohong. Setelah sumpah itu selesai diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama maka hakim akan memutuskan cerai li’an untuk selama-lamanya. Dan mereka tidak boleh melakukan perkawinan kembali antar sesamanya.
- 4) Calon pengantin wanita tidak dalam ikatan perkawinan. Artinya kalau ia masih dalam hubungan perkawinan walaupun tidak sebatas atau tidak diketahui domisili suaminya, maka tidak boleh melangsungkan

perkawinan dengan seorang pria lain. Dan dalam keadaan lepas bergaul (*scheiding van tafel en bed*) pun harus ada perceraian dahulu karena statusnya masih seorang istri.

5) Calon istri tidak dalam masa iddah, artinya ia tidak dalam jangka waktu tunggu. Dan dalam jangka waktu tunggu itu terdiri atas:

- a) Ditinggal suami karena meninggal dunia selama 4 bulan 10 hari tidak dalam keadaan hamil. Kalau ada tanda kehamilan sejak ditinggal suami, maka harus menunggu kelahiran bayinya.
- b) Cerai biasa, iddahnya tiga kali suci bagi wanita yang masih menstruasi. Kalau wanita itu hamil, maka iddahnya sesudah melahirkan.
- c) Iddah tiga bulan lamanya bagi seorang wanita yang telah berhenti menstruasi. Sedangkan bagi wanita yang belum pernah melakukan hubungan seksual dalam perkawinannya, maka tidak ada iddah.

Hikmah dari iddah ini sebenarnya untuk menentukan kebersihan wanita selama menjadi ibu rumah tangga, sehingga kalau melahirkan anak setelah putusnya perkawinan akan menjadi keyakinannya bahwa anak itu sebagai keturunannya.

b. Rukun Perkawinan

Yang dimaksud dengan *rukun* ialah segala sesuatu yang ditentukan menurut hukum Islam dan harus dipenuhi pada saat perkawinan dilangsungkan. Maksudnya bahwa kalau syarat-syarat perkawinannya telah dipenuhi, maka sebelum melangsungkan perkawinan saat-saat untuk sahnya harus ada rukun-rukun yang perlu dipenuhi.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 disebutkan ada empat rukun dalam perkawinan, yaitu:

- 1) Calon Suami dan Calon Istri
- 2) Wali nikah
- 3) Dua orang saksi, dan
- 4) Ijab dan qabul.

B. Tinjauan Umum tentang Wali Perkawinan

1. Pengertian Wali

Perwalian dalam term fiqih disebut “*wilayah*”, yang diartikan sebagai penguasaan dan perlindungan. Menurut istilah fiqih yang dimaksud perwalian adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.⁶ Dengan demikian menurut Kamal Muchtar perwalian dengan makna demikian dapat dibagi menjadi tiga, yaitu perwalian atas orang, perwalian atas barang, dan perwalian atas orang dalam perkawinan.⁷

Menurut Wahbah Zuhailiy, secara etimologis kata wilayah mempunyai makna lebih dari satu, yaitu:

- a. Wilayah bisa berarti pertolongan (*nasrun*).⁸ Hal ini sebagaimana dapat dilihat dari firman Allah SWT dalam surat al-Maidah [5] ayat 56, yang artinya:

⁶ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 92.

⁷ *Ibid*, h. 93.

⁸ Wahbah Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Jilid VII, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 186.

“Dan barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman menjadi pertolongannya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang”.

- b. Wilayah juga berarti cinta (*mahabbah*).⁹ Dalam hal ini dapat dilihat dari firman Allah SWT dalam surat at-Taubah [9] ayat 71, yang artinya:

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mencegah yang makruf, mencegah yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”

- c. Wilayah juga bisa berarti *“as-sulthan”*, kekuasaan dan kemampuan.¹⁰

Sebagaimana juga disebutkan bahwa wali bermakna *عليه أو الشيء* yang berarti “orang yang mengurus”.¹¹

Pengertian wali menurut Wahbah Zuhailiy di atas senada dirumuskan oleh Tihami dan Sohari Sahrani. Namun, beliau lebih spesifik menguraikan makna wali secara bahasa, yaitu:

- a. Orang yang menurut hukum (agama atau adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum itu dewasa;
- b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki);
- c. Orang shaleh (suci), penyebar agama, dan
- d. Kepala pemerintah dan sebagainya.¹²

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ A. Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 164-165.

¹² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakah: Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), h. 89

Dengan demikian, kata wali mengandung banyak makna yang disesuaikan dengan obyek perwalian itu sendiri. Adapun yang dimaksud wali dalam hal ini adalah perwalian atas orang dalam perkawinan.

Secara istilah (terminologi), wali perkawinan dapat dilihat dari pengertian berikut:

- a. Menurut Abdullah Kelib, wali nikah adalah orang yang bertanggung jawab atas perkawinan yang dilaksanakan di bawah perwaliannya, sehingga perkawinan tidak dianggap sah apabila tidak terdapat wali yang menyerahkan mempelai wanita kepada mempelai pria.¹³
- b. Menurut Abdurrahman al-Jaziri, wali nikah adalah orang yang memiliki wewenang atas sahnya akad dalam pernikahan, maka tidak sah akadnya tanpa adanya wali.¹⁴
- c. Menurut Zahri Hamid, wali nikah adalah orang laki-laki dalam suatu akad perkawinan dan berwenang mengijabkan calon mempelai perempuan. Adanya wali merupakan rukun dalam akad perkawinan.¹⁵
- d. Menurut Undang-Undang Perkawinan, wali nikah adalah orang yang memelihara anak atau anak-anak yang belum dewasa (curator), bila anak atau anak-anak itu menikah setelah berusia 19 tahun dan mencapai usia 21 tahun, maka izin menikahnya itu diberikan kepada wali atau keluarga yang mempunyai hubungan darah lurus ke atas (selain orang tua) dari anak atau anak-anak tersebut.¹⁶

¹³ Abdullah Kelib, *Hukum Islam*, (Semarang: Tugu Muda Indonesia, 1990), h. 11

¹⁴ Abd Rahman al-Jaziri, *al-Fiqih 'ala Madzaahib al-Arba'ah*, Jilid IV, (Mesir: al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1969), hlm. 26

¹⁵ Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan UUP di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, t.t), h. 24

¹⁶ Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan UUP di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, t.t), h. 24

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa ijab didalam perkawinan menurut Hukum Islam adalah wewenang wali semata-mata. Sehingga karena peranan wali yang mempunyai arti penting akan tetap dipertahankan apabila wanita itu tidak mempunyai wali nasab bisa digantikan kedudukannya oleh wali hakim.

Berkaitan dengan wali yang merupakan rukun dalam perkawinan, para ulama berbeda pendapat mengenai hukum wali dalam pernikahan, apakah semua gadis yang akan melangsungkan pernikahan harus ada wali ataukah tidak. Perbedaan pendapat tentang wali dapat dilihat dari uraian berikut:

- a. Jumhur ulama, termasuk di dalamnya Sa'id bin Musayyib, Hasan Al-Bashri, Abdullah bin Abdul Aziz, Ats-Tsauri dan Imam Syafi'i.¹⁷ Mereka semua berpendapat bahwasanya pernikahan tanpa wali tidak sah.
- b. Imam Malik berpendapatj wani jika yang akan menikah adalah orang yang biasa-biasa saja, bukan termasuk orang yang mempunyai kedudukan, kerupawanan dan bukan bangsawan tidak apa-apa ia menikah tanpa wali. Akan tetapi ketika ia seorang yang berkedudukan, berwajah rupawan dan banyak harta maka ketika menikah harus memakai wali.
- c. Abu Hanifah berpendapat bahwasanya wali bukanlah hal yang baku dalam nikah, akan tetapi seseorang juga dibolehkan menikahkan dirinya sendiri tanpa harus ada wali, dengan syarat ia seorang yang *kufu'* yaitu sudah baligh dan berakal.

Sedangkan pendapat yang rajih dan benar dari tiga pendapat di atas adalah pendapat pertama yang dibawa oleh jumhur ulama, yaitu seorang gadis ketika melangsungkan pernikahan harus ada wali bersamanya.

¹⁷ Ibnu Qudamah *Al-Mughni*, Juz 9, (Kairo: Dar al-Hadits, 2004), h. 119.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwasanya wali dalam pernikahan merupakan satu bagian yang tak mungkin untuk dipisahkan. Namun untuk bisa menjadi wali, seseorang harus memenuhi syarat standar minimal yang juga telah disusun oleh para ulama, berdasarkan pada ayat Al-quran dan sunnah nabawiyah. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagaimana berikut:

- a. Islam. Seorang ayah yang bukan beragama Islam tidak menikahkan atau menjadi wali bagi pernikahan anak gadisnya yang muslimah. Begitu juga orang yang tidak percaya kepada adanya Allah I (atheis). Ini adalah pendapat jumhur ulama di antaranya Malik, Syafi’I, Abu Ubaid. Dalil haramnya seorang kafir menikahkan anaknya yang muslimah adalah sebagaimana firman Allah SWT yang artinya:

“Dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain.”

- b. Berakal, maka seorang yang kurang waras, idiot atau gila tidak syah bila menjadi wali bagi anak gadisnya. Meskipun gila hanya kadang-kadang, terlebih lagi gila yang terus menerus tidak ada perbedaan di antara keduanya menurut pendapat yang paling benar.¹⁸
- c. Bulugh, maka seorang anak kecil yang belum pernah bermimpi atau belum baligh, tidak syah bila menjadi wali bagi saudara wanitanya atau anggota keluarga lainnya.

¹⁸ Imam Nawawi *Al-Majmu’ Sarh Al-Muhaddzab*, Juz 17, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), h. 318.

- d. Merdeka, maka seorang budak tidak syah bila menikahkan anaknya atau anggota familinya, meskipun ia beragama Islam, berakal, baligh. Meskipun ada sebagian ulama yang membolehkannya, namun menurut pendapat yang paling benar adalah ia tidak boleh menjadi wali.¹⁹
- e. Laki-laki, jadi seorang perempuan tidak berhak menjadi wali nikah.

Inilah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk menjadi wali, seandainya seseorang telah memenuhi syarat-syarat di atas dan ia termasuk dari orang yang berhak menjadi wali, maka ia diperbolehkan untuk menjadi wali bagi seorang gadis yang masih saudaranya yang hendak melangsungkan pernikahan.

2. Dasar Hukum Wali Nikah

Adanya wali dalam pernikahan bagi seorang perempuan atau seseorang yang tidak mukallaf merupakan rukun dari akad nikah. Adapun sumber-sumber dalil yang dijadikan sebagai landasan hukum (*hujjah*) keberadaan wali nikah adalah sebagai berikut:

- a. Dalil-dalil al-Qur'an

Allah SWT berfirman, yang artinya:

“Dan kawinlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui” (TQS. An-Nuur [24]: 32)

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari pada wanita musyrik, walau dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahi orang-orang musyrik dengan wanita mukmin sebelum mereka beriman.

¹⁹Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, (Kairo: Dar as-Salam, 2001), h. 336.

Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari pada laki-laki musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke arah neraka, sedangkan Allah mengajak ke arah syurga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran” (TQS. Al-Baqarah [2]: 221)

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak” (TQS. Al-Baqarah [2]: 232)

Tiga ayat di atas merupakan pegangan dan argumentasi (*hujjah*) di kalangan ulama fikih tentang wajib adanya wali dalam pernikahan, dan walilah yang menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya. Dan dua ayat pertama di atas, secara jelas dan tekstual menunjukkan tentang perintah Allah SWT kepada para wali untuk menikahkan anak perempuannya. Jadi, pelaku yang menikahkan dalam hal ini adalah orang tua (wali)-nya, bukan perempuan yang bersangkutan.

b. Dalil-dalil al-Hadits

Hadits Nabi SAW yang bersabda, yang artinya:

"Dari Abu Burdah Ibnu Abu Musa, dari ayahnya Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: Tidak sah nikah kecuali” (HR. Abu Dawud).²⁰

“Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Seorang janda lebih berhak menentukan (pilihan) dirinya daripada walinya dan seorang gadis diajak berembuk, dan tanda izinnya adalah diamnya." Riwayat Imam Muslim. Dalam lafaz lain disebutkan, "Tidak ada perintah bagi wali terhadap janda, dan anak yatim harus diajak berembuk." (HR. Abu Dawud).²¹

²⁰ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz. 2, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), h. 229.

²¹ *Ibid*

Dari beberapa dalil di atas baik al-Quran maupun al-hadits yang kesemuanya menjelaskan tentang adanya wali dalam suatu pernikahan, jelas merupakan suatu urgensi yang disyariatkan oleh Allah SWT dalam perkawinan menetapkan adanya wali.

3. Syarat-syarat Wali Nikah

Tidak semua orang bisa menjadi wali, karena wali bertanggung jawab terhadap sahnyanya suatu akad nikah yang dilangsungkan. Menurut Wahbah Zuhailiy, ada lima syarat seseorang bisa menjadi wali dalam pernikahan, dua syarat disepakati oleh para ulama, sementara tiga syarat lainnya masih diperdebatkan²². Adapun dua syarat tersebut adalah:

- a. *Kamaal al-Ahliyyah*, dengan syarat bahwa seorang wali harus baligh dan berakal; dalam hal ini tidak boleh hamba sahaya. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila, cacat mental dan pemabuk tidak boleh menjadi wali. Begitu juga dengan orang yang cacat penglihatan karena umurnya yang sudah tua, atau orang yang sudah pikun dan hamba sahaya. Mereka selain hamba sahaya, tidak boleh menjadi wali karena tidak sempurna akalunya. Sedangkan wali menuntut adanya kesempurnaan. Adapun hamba sahaya tidak boleh menjadi wali karena sibuk melayani majikannya dan ia tidak boleh mengurus hal-hal lain.
- b. Antara wali dengan yang diwalikan harus seagama. Seorang muslim tidak boleh menjadi wali bagi yang tidak muslim (kafir), begitu juga sebaliknya. Menurut Hanbali dan Hanafi, seorang wali tidak boleh menikahkan orang

²² Wahbah Zuhailiy, *Op. Cit*, h. 195.

kafir dengan perempuan muslim, begitu juga sebaliknya. Sedangkan menurut Mazhab Syafii dan lainnya, wali kafir boleh menikahkan perempuan kafir baik bagi calon suaminya kafir atau muslim.²³

Sedangkan tiga syarat lain yang masih diperdebatkan adalah:

- a. Laki-laki. Jumhur ulama selain mazhab Hanafi berpendapat bahwa laki-laki adalah syarat bagi seorang wali. Oleh karena itu, wanita tidak boleh menjadi wali, karena wanita tidak boleh menjadi wali atas dirinya sendiri. Menurut mazhab Hanafi, bahwa laki-laki tidak menjadi syarat tetap perwalian.
- b. Adil; yaitu menetapi agama dengan jalan melaksanakan segala kewajiban agama dan menjauhi dosa besar, seperti zina, minum khamar dan lain sebagainya. Menurut mazhab Syafii dan Hanbali, sifat adil merupakan syarat bagi seorang wali dalam pernikahan. Oleh karena itu, orang yang tidak adil atau fasuk, tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan.
- c. *Ar-Rusyd*. Menurut mazhab Hanbali, *ar-Rusyd*, berarti mengetahui *kafaah* dan kemaslahatan-kemaslahatan dalam pernikahan. *Mursyid*, bukan hanya orang yang bisa menjaga harta, karena *mursyid* berbeda-beda pada setiap tempatnya. Menurut mazhab Syafii, *ar-rusyd* adalah tidak menyia-nyiakan harta. Menurut mazhab Hanbali dan Syafii, bahwa *ar-rusyd* merupakan syarat yang ditetapkan bagi wali dalam pernikahan. Karena orang yang tercegah kewaliannya, disebabkan sifat bodoh, tidak bisa menjadi wali atas dirinya, dan juga tidak bisa menjadi wali atas orang lain.²⁴

²³ *Ibid*, h. 195-196.

²⁴ *Ibid*, h. 197-198.

Menurut Muhammad Asmawi bahwa syarat bagi seorang wali, selain Islam, baligh dan berakal sehat sebagaimana yang disepakati oleh Maliki, Syafii dan Hanbali, adalah harus seorang laki-laki. Di samping itu, seseorang yang menjadi wali harus tertanam dalam jiwanya sifat adil, dan bukan termasuk orang dalam kategori fasik.²⁵ Sedangkan menurut pendapat Hanafi tidak mempermasalahkan orang yang menjadi wali harus adil. Orang fasik-pun dibolehkan menjadi wali, sejak zaman dahulu tidak pernah terjadi pemilahan antara orang yang fasik dengan orang yang adil.²⁶

4. Macam-macam Wali

Macam-macam wali nikah adalah sebagai berikut:

a. Wali nasab

Wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah *patrilineal* dengan calon mempelai perempuan. Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Wali nasab mujbir

Mujbir artinya orang yang memaksa. Sedangkan wali nasab *mujbir* adalah wali nasab yang berhak memaksa kehendaknya untuk mengawinkan calon mempelai perempuan tanpa adanya izin dari yang bersangkutan dan batas-batas yang wajar. Yang termasuk dalam kategori wali *mujbir* adalah ayah, kakek dan seterusnya ke atas.

²⁵ Muhammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perdebatan*, (Yogyakarta: Dar al-Salam, 2004), h. 67.

²⁶ *Ibid.*

Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh wali nasab mujbir, yaitu:

- a) Tidak ada permusuhan wali mujbir dengan anaknya
- b) Dinikahkan dengan laki-laki yang setara dan selevel
- c) Laki-laki yang menjadi jodohnya harus mampu membayar maskawin, dan tidak kurang dari mahal *mitsil*.
- d) Tidak dinikahkan dengan laki-laki yang tidak mampu membayar maskawin
- e) Tidak dinikahkan dengan laki-laki yang cacat fisik dan psikis, sehingga perjalanan rumah tangganya tidak harmonis dan sering terjadi perkelahian.²⁷

Menurut Selamat Abidin dan Aminuddin, apabila syarat-syarat tersebut di atas tidak dipenuhi, maka hak ijbar menjadi gugur. Berdasarkan beberapa syarat di atas, maka menurut Selamat Abidin dan Aminuddin, ijbar tidak tepat diartikan sebagai paksaan, akan tetapi lebih tepat bila diartikan sebagai pengarahan.²⁸

Di samping itu, bagi perempuan yang sudah dewasa dan bisa menentukan baik dan buruk sesuatu perkara, baik perempuan itu masih perawan atau janda, maka boleh menikahkan dirinya sendiri dengan laki-laki yang dicintai tanpa memerlukan adanya wali, dengan syarat

²⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 42.

²⁸ Selamat Abidin dan Aminudin, *Fikih Munakahat*, Jilid. 1, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 96.

calon suami memiliki status yang sama dengannya. Akan tetapi, ketika suami tidak memiliki status yang sama dengan dirinya dan sering terjadi percekocokan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, maka walinya berhak menggugat cerai kepada suaminya tersebut.²⁹

Imam Hanafi berpendapat bahwa setiap wali yang terdapat dalam strukturisasi wali termasuk wali mujbir. Dalam hal ini, fungsi wali mujbir hanya terbatas pada anak-anak kecil baik laki-laki maupun perempuan, dan mereka berhak menjadi wali.

2) Wali nasab biasa

Dikatakan sebagai wali nasab biasa, karena wali nasab tidak memiliki kekuasaan untuk memaksa kawin kepada calon mempelai perempuan. Wali nasab bisa terdiri dari saudara laki-laki kandung atau seayah, paman yaitu saudara laki-laki ayah baik kandung atau seayah dan seterusnya anggota laki-laki menurut garis keturunan patrilineal.

Di samping itu, mazhab Syafiiyyah merumuskan urutan wali dalam pernikahan, adalah sebagai berikut:³⁰

- a) Ayah kandung.
- b) Ayah dari ayah (Kakek)
- c) Saudara laki-laki seayah dan seibu (saudara kandung)
- d) Saudara laki-laki seayah.
- e) Anak laki-laki dari saudara sekandung yang laki-laki.

²⁹ Muhammad Asmawi, *Op. Cit*, h. 80-81.

³⁰ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini Al-Hushaini, *Kifayah al-Akhyar fi Hilli Ghayah al-Ikhtisar*, (Damaskus: Dar al-Khair, 1994), h. 312.

- f) Anak laki-laki dari saudara seayah.
- g) Saudara laki-laki ayah (paman)
- h) Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah (sepupu)

Daftar urutan wali di atas tidak boleh dilangkahi atau diacak-acak. Sehingga jika ayah kandung masih hidup, maka tidak boleh hak kewaliannya itu diambil alih oleh wali pada nomor urut berikutnya. Kecuali, bila pihak yang bersangkutan memberi izin kepada urutan yang setelahnya.

Kemudian, pentingnya untuk diketahui bahwa seorang wali berhak mewakilkan hak perwaliannya itu kepada orang lain,³¹ meski tidak termasuk dalam daftar para wali. Hal itu biasa sering dilakukan di tengah masyarakat dengan meminta kepada tokoh ulama setempat untuk menjadi wakil dari wali yang syah. Dan untuk itu harus ada akad antara wali dan orang yang mewakilkan. Akan tetapi sebaliknya apabila pihak wanita mewakilkan kepada orang lain tanpa izin dari wali maka pernikahannya tidak sah.

Sebagai contoh, ketika dalam kondisi di mana seorang ayah kandung tidak bisa hadir dalam sebuah akad nikah, maka dia bisa saja mewakilkan hak perwaliannya itu kepada orang lain yang dipercayainya, meski bukan termasuk urutan dalam daftar orang yang berhak menjadi wali.

³¹ Imam Nawawi, *Op. Cit.*, h. 305.

Sehingga bila akad nikah akan dilangsungkan di luar negeri dan semua pihak sudah ada kecuali wali, karena dia tinggal di Indonesia dan kondisinya tidak memungkinkannya untuk ke luar negeri, maka dia boleh mewakilkan hak perwaliannya kepada orang yang sama-sama tinggal di luar negeri itu untuk menikahkan anak gadisnya. Namun hak perwalian itu tidak boleh dirampas atau diambil begitu saja tanpa izin dari wali yang sesungguhnya. Bila hal itu dilakukan, maka pernikahan itu tidak syah dan harus dipisahkan saat itu juga.

b. Wali Hakim

Menurut Sayuti Thalib, wali hakim adalah penguasa yang berwenang dalam bidang pernikahan, biasanya penghulu nikah atau penguasa lain dari Departemen Agama dalam hal apabila ditemui kesulitan untuk menghadirkan wali nasab atau adanya halangan dari wali nasab atas perwalian dalam pernikahan. Dalam hal ini, seorang calon pengantin perempuan dapat mempergunakan bantuan wali hakim, baik melalui pengadilan agama atau tidak, tergantung prosedur yang ditempuh.³²

c. Wali Muhakam

Wali muhakam adalah wali nikah yang terdiri dari seorang laki-laki yang diangkat oleh kedua calon suami isteri untuk menikahkan mereka, dikarenakan tidak adanya wali nasab, baik karena tidak memenuhi syarat atau menolak dan wali hakim pun tidak dapat bertindak sebagai wali nasab karena berbagai macam sebab.³³

³² Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Perempuan*, (Jakarta: UI Press, 1982), h. 65.

³³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan*, h. 45.

Berdasarkan macam-macam wali sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dipahami bahwa seorang wali nasab memiliki peranan penting dalam pernikahan, dan keberadaannya merupakan suatu keharusan serta menjadi salah satu penyempurna (rukun) dalam akad perkawinan. Meskipun, di kalangan ulama ada yang berbeda pendapat tentang penempatan wali sebagai rukun dalam pernikahan, namun dari pendapat yang dikemukakan, di mana mayoritas ulama menempatkan wali sebagai rukun dan pendapat ini dianggap lebih kuat (rajih) dari pendapat lainnya.

Kemudian, dari uraian tentang macam-macam wali dalam pernikahan, dapat dipahami bahwa wali nasab memiliki peran penting dari pembagian wali lainnya. Meskipun demikian, hak wali nasab dapat berpindah kepada wali yang lain (misalnya wali hakim), ketika wali nasab tidak memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditetapkan. Namun, dalam kondisi ideal (normal) wali nasab dapat menikahkan anak perempuan kepada laki-laki yang diinginkan, ketika calon suami dari anak perempuannya memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan.

Di samping itu, para ulama berpendapat bahwa wali tidak boleh enggan menikahkan perempuan yang dalam perwaliannya, tidak boleh menyakitinya atau melarangnya kawin, padahal yang akan mengawininnya itu sudah sekufu dan sanggup membayar maskawin. Dalam hal seperti ini, apabila walinya enggan menikahkan, maka si perempuan berhak mengadukan halnya kepada hakim untuk dinikahkan. Dalam hal semacam ini, hak wali yang enggan menikahkan itu tidak berpindah kepada wali hakim yang lebih rendah tingkatannya, tetapi langsung berpindah ke tangan hakim.

Menurut Sayuti Thalib, wali hakim adalah penguasa yang berwenang dalam bidang pernikahan, biasanya penghulu nikah atau penguasa lain dari Departemen Agama dalam hal apabila ditemui kesulitan untuk menghadirkan wali nasab atau adanya halangan dari wali nasab atas perwalian dalam pernikahan. Dalam hal ini, seorang calon pengantin perempuan dapat mempergunakan bantuan wali hakim, baik melalui pengadilan agama atau tidak, tergantung prosedur yang ditempuh.³⁴

Berkaitan dengan masalah wali hakim, dinyatakan didalam pasal 23 KHI yang berbunyi:

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghidirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
2. Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.³⁵

Sebelumnya telah di terangkan bahwa wali anak perempuan merupakan hak dari wali aqrab yang tidak dapat berpindah kepada wali lain atau kepada penguasa, kecuali apabila ada sebab-sebab yang dapat diterima. Hal-hal yang menyebabkan hak menjadi wali dapat berpindah kepada wali hakim, yaitu (1) Apabila ada sangketa antara wali, dan (2) Apabila tidak ada wali. Hal ini dibenarkan apabila telah jelas tidak adanya wali atau wali tidak berada pada tempat.³⁶

³⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Perempuan*, (Jakarta: UI Press, 1982), h. 65.

³⁵ H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), h. 120.

³⁶ Inpres No. 1 tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: tp, tt), h. 28.

BAB IV

PENGALIHAN HAK PERWALIAN KEPADA WALI HAKIM
MELALUI *HAND PHONE* (HP) DI KUA KECAMATAN RANGSANG
BARAT KABUPATEN MERANTI

A. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi terjadi Pengalihan Hak Perwalian kepada Wali Hakim

Berdasarkan hasil observasi di KUA Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Propinsi Riau, di mana peneliti menemukan adanya kebiasaan masyarakat yang menjadikan wali hakim sebagai wali dalam perkawinan. Sementara, wali nasab ada dan secara hukum Islam tidak mengalami kecacatan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam tabel angket berikut ini:

Tabel 4.1 : Pengalihan Hak Perwalian Kepada Wali Hakim Merupakan Suatu Kebiasaan Yang Dilakukan Masyarakat

No	Indikator	Responden	Persentase
1	Ya	26	100.00%
2	Tidak	-	-
3	Tidak tahu	-	-
	Jumlah	26	100.00%

Sumber: Data Sebaran Angket Penelitian, Maret 2013

Dari tabel di atas diketahui bahwa mayoritas responden yakni berjumlah 26 orang responden atau 100,00% menjawab “Ya”. Dengan demikian dapat dipahami bahwa peralihan hak perwalian kepada wali hakim merupakan suatu kebiasaan yang terjadi di masyarakat setempat. Dalam

menanggapi masalah peralihan hak perwalian kepada wali hakim di Kecamatan Rangsang Barat, masyarakat berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa kebiasaan tersebut merupakan suatu tradisi secara turun temurun, namun mayoritas masyarakat berpandangan bahwa kebiasaan tersebut bukanlah suatu tradisi secara turun temurun.

Perbedaan pandangan masyarakat dalam menilai kebiasaan dalam peralihan hak perwalian kepada wali hakim dalam perkawinan dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.2 : Peralihan Hak Perwalian Dalam Perkawinan Merupakan Suatu Kebiasaan Secara Turun Temurun Sejak Dahulu

No	Indikator	Responden	Persentase
1	Ya	7	26.92%
2	Tidak	15	57.69%
3	Tidak tahu	4	15.38%
	Jumlah	26	100.00%

Sumber: Data Sebaran Angket Penelitian, Maret 2013

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menjawab “Tidak” berjumlah 15 orang atau 57,69%. Dengan demikian dapat dipahami bahwa peralihan hak perwalian kepada wali hakim yang dilakukan masyarakat Kecamatan Rangsang Barat bukanlah merupakan tradisi yang dilakukan secara turun temurun.

Meskipun, di antara masyarakat ada yang menilai bahwa kebiasaan tersebut merupakan suatu tradisi yang dilakukan secara turun temurun. Hal ini terlihat dari tabel di atas responden yang menjawab “Ya” berjumlah 7 orang atau 26,92%. Dengan demikian, peneliti berpandangan bahwa kebiasaan

tersebut merupakan suatu budaya, yakni budaya dalam menghargai dan menghormati pemimpin di masyarakat. Hal ini sebagaimana hasil wawancara yang penelitian lakukan, sebagai berikut:

“Kebiasaan di masyarakat dalam menjadikan wali hakim dalam perkawinan, merupakan suatu budaya menghormati pemimpin. Karena, KUA merupakan representatif dari pemimpin dalam suatu negara. Dengan menjadikan KUA sebagai wali hakim, maka tanpa disadari tindakan tersebut merupakan tindakan menghormati pemimpin itu sendiri.”¹

Di samping itu, kebiasaan masyarakat dalam menjadikan wali hakim sebagai wali dalam perkawinan dan kebiasaan tersebut tidaklah merupakan suatu tradisi yang terjadi secara turun temurun, akan tetapi suatu budaya yang dilakukan semata-mata dalam rangka menghormati pemimpin (KUA), karena kebiasaan tersebut bukanlah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh generasi sebelumnya. Akan tetapi, kebiasaan tersebut dilakukan masih dalam satu kurun, yakni kebiasaan yang tidak merupakan suatu warisan yang ditinggalkan. Hal ini dapat diketahui dari hasil sebaran angket dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.3 : Masyarakat Melakukan Pengalihan Hak Perwalian Dalam Perkawinan

No	Indikator	Responden	Persentase
1	Kurang dari 5 tahun	26	100.00%
2	5 hingga 10 tahun yang lalu	-	-
3	Lebih dari 10 tahun yang lalu	-	-
	Jumlah	26	100.00%

Sumber: Data Sebaran Angket Penelitian, Maret 2013

¹ Syamsuddin, *Wawancara*, Tanggal 19 Maret 2013.

Pada tabel di atas terlihat bahwa keseluruhan responden (26 orang atau 100,00%) menjawab bahwa kebiasaan masyarakat dalam peralihan hak perwalian kepada wali hakim dalam perkawinan dalam kurun waktu kurang dari lima tahun. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kebiasaan tersebut baru saja dilakukan masyarakat di Kecamatan Rangsang Barat. Dengan demikian, sebelumnya hanya sebagian dari masyarakat di Kecamatan Rangsang Barat yang menjadikan wali hakim sebagai wali dalam perkawinan anak perempuannya, dan kebanyakan dari masyarakat ketika menikahkan anak perempuannya orang tuanyalah atau urutan dari wali nasab lainnya yang menjadi wali bagi perempuan dalam suatu perkawinan.

Kondisi demikian, sebagaimana dijelaskan dari hasil wawancara peneliti dengan responden, sebagai berikut:

“Kebiasaan masyarakat meminta pihak KUA sebagai wali hakim dalam perkawinan terjadi dalam kurun waktu lebih kurang lima tahun terakhir. Sebelumnya, masyarakat ketika akad perkawinan ingin dilangsungkan, maka yang menjadi wali adalah orang tua kandungnya sebagai wali nasab atau wali nasab yang lain berdasarkan urutan yang telah ditetapkan. Karena, suatu kebanggaan bagi orang tua mampu menjadi wali dalam perkawinan anak perempuannya. Kemudian, menjadi wali bagi anak perempuan dalam perkawinan merupakan simbol dari penyerahan tanggung jawab dari orang tua kepada seorang laki-laki yang akan menjadi suami dari anak perempuannya sendiri”.²

Berdasarkan hasil wawancara di atas, jelaslah bahwa kebiasaan menjadikan wali hakim sebagai wali dalam perkawinan di Kecamatan Rangsang Barat merupakan suatu kebiasaan yang baru dilakukan masyarakat, dan kebiasaan tersebut tidaklah merupakan suatu hal lazim dilakukan sebelumnya. Karena sebelumnya, yang bertindak sebagai wali dalam

² Herman, *Wawancara*, Tanggal 18 Maret 2013.

perkawinan adalah orang tua kandung dari pihak perempuan atau wali nasab yang lainnya; menjadi wali dalam perkawinan anak perempuannya merupakan suatu tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh wali nasab itu sendiri. Secara prinsip, ketika ijab qabul antara wali (orang tua) dengan pengantin laki-laki merupakan penyerah tanggung jawab dari orang tua kepada laki-laki yang akan menjadi suami dari anaknya.

Meskipun demikian, kebiasaan yang dilakukan di masyarakat Kecamatan Rangsang Barat terjadi dalam kurun waktu lebih kurang lima tahun terakhir. Hal ini dilatarbelakangi keinginan masyarakat setempat dalam rangka menghormati pemimpin mereka yakni representatif dari pemimpin yaitu pihak KUA itu sendiri. Dengan demikian, jelaslah bahwa peralihan hak perwalian kepada wali hakim yang terjadi di masyarakat Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti bukan merupakan suatu tradisi secara turun temurun, akan tetapi suatu kebiasaan yang baru dilakukan. Karena dari uraian di atas diketahui bahwa kebiasaan tersebut tidaklah suatu ke-laziman yang dilakukan oleh generasi sebelumnya.

Hasil observasi yang peneliti lakukan, di mana sebagian masyarakat di Kecamatan Rangsang Barat dalam perkawinan menggunakan wali hakim sebagai wali dalam perkawinan, sementara wali nasab tidak cacat secara hukum. Adapun pasangan calon penganti yang melakukan akad perkawinan menggunakan wali hakim dan tidak menggunakan wali nasab, di antaranya sebagai berikut :

- 1) Pasangan Afrizal dan Linda yang melaksanakan akad perkawinan pada tanggal 11 Januari 2011
- 2) Pasngan Hendri dan Wati yang melaksanakan akad perkawinan pada tanggal 23 Maret 2011, dan
- 3) Pasangan Feri dan Febriana, melaksanakan akad perkawinan pada tanggal 30 Maret 2011³.

Di samping itu, untuk mengetahui tidak cacatnya wali nasab untuk menjadi wali dalam perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam tabel angket di bawah ini :

Tabel 4.4 : Wali Nasab Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Wali Dalam Perkawinan

No	Indikator	Responden	Persentase
1	Ya	7	26.92%
2	Tidak	19	73.08%
3	Tidak tahu	-	-
	Jumlah	26	100.00%

Sumber: Data Sebaran Angket Penelitian, Maret 2013.

Dari tabel di atas diketahui bahwa dari 26 orang responden, di mana 7 orang atau 26,92% menjawab “Ya”, dengan demikian dapat dipahami bahwa hanya 26,92% responden menjawab bawah peralihan hak perwalian kepada wali hakim disebabkan karena wali nasab tidak memenuhi syarat sebagai wali dalam perkawinan. Sementara responden menjawab “Tidak” berjumlah 19 orang atau 73,08%, dengan demikian mayoritas responden menjawab bahwa peralihan hak perwalian kepada wali hakim tidak disebabkan karena wali nasab tidak memenuhi syarat dalam perkawinan.

³ Data Kantor KUA Kecamatan Rangsang Barat Tahun 2011.

Menurut Wahbah Zuhailiy, ada lima syarat seseorang bisa menjadi wali dalam pernikahan, dua syarat disepakati oleh para ulama, sementara tiga syarat lainnya masih diperdebatkan⁴. Adapun dua syarat tersebut adalah:

1. *Kamaal al-Ahliyyah*, dengan syarat bahwa seorang wali harus baligh dan berakal; dalam hal ini tidak boleh hamba sahaya. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila, cacat mental dan pemabuk tidak boleh menjadi wali. Begitu juga dengan orang yang cacat penglihatan karena umurnya yang sudah tua, atau orang yang sudah pikun dan hamba sahaya. Mereka selain hamba sahaya, tidak boleh menjadi wali karena tidak sempurna akalunya. Sedangkan wali menuntut adanya kesempurnaan. Adapun hamba sahaya tidak boleh menjadi wali karena sibuk melayani majikannya dan ia tidak boleh mengurus hal-hal lain.
2. Antara wali dengan yang diwalikan harus seagama. Seorang muslim tidak boleh menjadi wali bagi yang tidak muslim (kafir), begitu juga sebaliknya. Menurut Hanbali dan Hanafi, seorang wali tidak boleh menikahkan orang kafir dengan perempuan muslim, begitu juga sebaliknya. Sedangkan menurut Mazhab Syafii dan lainnya, wali kafir boleh menikahkan perempuan kafir baik bagi calon suaminya kafir atau muslim.⁵

Sedangkan tiga syarat lain yang masih diperdebatkan adalah:

1. Laki-laki. Jumhur ulama selain mazhab Hanafi berpendapat bahwa laki-laki adalah syarat bagi seorang wali. Oleh karena itu, wanita tidak boleh menjadi wali, karena wanita tidak boleh menjadi wali atas dirinya sendiri. Menurut mazhab Hanafi, bahwa laki-laki tidak menjadi syarat tetap perwalian.

⁴ Wahbah Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Jilid VII, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 195.

⁵ *Ibid*, h. 195-196.

2. Adil; yaitu menetapi agama dengan jalan melaksanakan segala kewajiban agama dan menjauhi dosa besar, seperti zina, minum khamar dan lain sebagainya. Menurut mazhab Syafii dan Hanbali, sifat adil merupakan syarat bagi seorang wali dalam pernikahan. Oleh karena itu, orang yang tidak adil atau fasuk, tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan.
3. *Ar-Rusyd*. Menurut mazhab Hanbali, *ar-Rusyd*, berarti mengetahui *kafaah* dan kemaslahatan-kemaslahatan dalam pernikahan. *Mursyid*, bukan hanya orang yang bisa menjaga harta, karena *mursyid* berbeda-beda pada setiap tempatnya. Menurut mazhab Syafii, *ar-rusyd* adalah tidak menyia-nyiakan harta. Menurut mazhab Hanbali dan Syafii, bahwa *ar-rusyd* merupakan syarat yang ditetapkan bagi wali dalam pernikahan. Karena orang yang tercegah kewaliannya, disebabkan sifat bodoh, tidak bisa menjadi wali atas dirinya, dan juga tidak bisa menjadi wali atas orang lain.⁶

Berdasarkan beberapa syarat di atas, peralihan hak perwalian kepada wali hakim yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Rangsang Barat tidak disebabkan oleh faktor tidak terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan oleh syara' bagi seorang wali dalam perkawinan, akan tetapi adanya faktor lain yang melatar-belakangi peralihan hak perwalian tersebut.

Adapun faktor yang melatarbelakangi peralihan hak perwalian kepada wali hakim disamping karena ingin menghormati pemimpin sebagaimana telah diuraikan di atas, juga disebabkan oleh faktor ketidakmampuan orang tua untuk menjadi wali dalam perkawinan anak perempuan mereka. Hal ini sebagaimana dijelaskan dari tabel di bawah ini:

⁶ *Ibid*, h. 197-198.

Tabel 4.5 : Faktor Ketidak-Mampuan Wali Dalam Melakukan Ijab Dan Qabul Pada Saat Akad Perkawinan Berlangsung

No	Indikator	Responden	Persentase
1	Ya	14	53.85%
2	Tidak	12	46.15%
3	Tidak tahu	-	-
	Jumlah	26	100.00%

Sumber: Data Sebaran Angket Penelitian, Maret 2013

Pada tabel di atas diketahui bahwa dari 26 orang responden, 14 orang di antaranya atau 53,85% menjawab “Ya”, dengan demikian dapat dipahami bahwa peralihan hak perwalian dilatarbelakangi oleh faktor ketidakmampuan orang tua (wali) dalam melakukan ijab dan qabul dari perkawinan anak perempuan mereka. Sementara 12 orang responden atau 46,15% menjawab “Tidak”, dengan demikian dapat dipahami bahwa peralihan hak perwalian tidak disebabkan oleh ketidakmampuan orang tua dalam melakukan ijab qabul dari perkawinan anak perempuan mereka.

Dari persentase dalam tabel di atas diketahui bahwa mayoritas responden menjawab bahwa peralihan hak perwalian kepada wali hakim, bukan disebabkan oleh faktor ketidakmampuan orang tua menjadi wali dalam akad perkawinan dan menyerahkan hak perwalian kepada wali hakim (pihak KUA). Kemudian, faktor ketidakmampuan orang tua menjadi wali dalam perkawinan anak perempuan mereka di Kecamatan Rangsang Barat dan meminta wali hakim menjadi wali dalam akad perkawinan tersebut, disebabkan oleh kekhawatiran akan salahnya dalam pelaksanaan akad perkawinan tersebut. Hal ini sebagaimana hasil wawancara peneliti, sebagai berikut:

“Pengalihan hak perwalian dari orang tua kepada wali hakim dalam perkawinan karena kekhawatiran dan ketakutan yang dimiliki orang tua, karena orang tua (wali) tidak biasa tampil dan berkomunikasi ke depan dan disaksikan oleh khalayak ramai. Hal demikian, akan membuat pelaksanaan akad perkawinan tertunda-tunda, disebankan pelaksanaan akad perkawinan dilakukan secara berulang-ulang. Karena orang tua (wali) selalu salah dalam melafalkan ijab dan qabul dalam perkawinan tersebut”.⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas, jelaslah bahwa ketidakmampuan orang tua menjadi wali dalam akad perkawinan perempuannya dan meminta wali hakim sebagai wali dalam akad perkawinan tersebut disebabkan orang tua tidak percaya diri dalam melakukan ijab dan qabul dalam perkawinan. Sikap tidak percaya diri tersebut membuat orang tua merasa khawatir dan takut dengan kesalahan dalam mengucapkan ijab dan qabul dalam akad perkawinan.

Hasil wawancara di atas juga didukung oleh hasil observasi yang peneliti lakukan, di mana adanya pelafalan ijab dan qabul antara wali (orang tua) perempuan dengan pengantin laki-laki dilakukan secara berulang-ulang sampai lebih dari sepuluh kali. Dalam kondisi yang berbeda, adanya wali (orang tua) pihak perempuan yang tetap salah pada saat melafalkan ijab dalam akad perkawinan.

Di samping faktor ketidak-mampuan orang tua dalam menjadi wali dalam perkawinan anak perempuannya, di mana peralihan hak perwalian kepada wali hakim juga dilatarbelakangi oleh faktor perkawinan yang dilangsungkan tidak dihadiri oleh orang tua. Sehingga antara pasangan laki-laki dan perempuan memutuskan untuk tetap melangsung akad perkawinan, tanpa dihadiri oleh orang tua, terutama orang tua dari perempuan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dari tabel angket berikut ini:

⁷ Ahmad Sobari, *Wawancara*, Tanggal 20 Maret 2013.

Tabel 4.6 : Faktor Perkawinan Yang Dilangsungkan Tanpa Dihadiri Oleh Orang Tua, Terutama Orang Tua Dari Pihak Perempuan

No	Indikator	Responden	Persentase
1	Ya	19	73.08%
2	Tidak	7	26.92%
3	Tidak tahu	-	-
	Jumlah	25	96.15%

Sumber: Data Sebaran Angket Penelitian, Maret 2013

Pada tabel di atas diketahui bahwa responden yang menjawab “Ya” berjumlah 19 orang atau 73,08%, dengan demikian dapat dipahami bahwa peralihan hak perwalian kepada wali hakim disebabkan oleh faktor perkawinan yang dilangsungkan tanpa dihadiri orang tua, terutama orang tua dari pihak perempuan. Sementara responden yang menjawab “Tidak” berjumlah 7 orang atau 26,92%, dengan demikian dapat dipahami bahwa peralihan hak perwalian kepada wali hakim disebabkan oleh faktor lainnya.

Berdasarkan persentase pada tabel di atas diketahui bahwa mayoritas responden menjawab bahwa peralihan hak perwalian kepada wali hakim di Kecamatan Rangsang Barat disebabkan perkawinan yang dilangsungkan tidak dihadiri oleh kedua orang tua, terutama orang tua dari pihak perempuan.

Hasil wawancara dengan pihak KUA Kecamatan Rangsang Barat, sebagai berikut:

“Peralihan hak perwalian kepada wali hakim, karena orang tua dari pihak perempuan sedang sakit keras dan tidak bisa melakukan perjalanan jauh, sehingga yang bersangkutan tidak bisa hadir dalam akan perkawinan tersebut. Dengan demikian, upaya yang dilakukan dengan meminta wali hakim menjadi wali dalam akad perkawinan

tersebut. Karena bagi perempuan berstatus gadis, yang berhak atas dirinya adalah keluarganya (wali nasab), kondisi demikian berbeda dengan perempuan yang berstatus janda, maka yang berhak atasnya adalah dirinya sendiri, dan bukan keluarga (wali)”⁸.

Di samping faktor orang tua sakit keras, di mana peralihan hak perwalian kepada wali hakim juga disebabkan oleh faktor ekonomi yang dimiliki orang tua. Hal ini sebagaimana diketahui dari tabel angket berikut:

Tabel 4.7 : Faktor Ekonomi Keluarga dapat Menyebabkan Orangtua tidak bisa hadir dalam Akad Perkawinan

No	Indikator	Responden	Persentase
1	Ya	19	73.08%
2	Tidak	7	26.92%
3	Tidak tahu	-	-
	Jumlah	26	100.00%

Sumber: Data Sebaran Angket Penelitian, Maret 2013.

Dari tabel di atas diketahui bahwa responden yang menjawab “Ya” berjumlah 19 orang atau 73,08%, dengan demikian dapat dipahami bahwa faktor ekonomi menjadi faktor peralihan hak perwalian kepada wali hakim. Sementara, responden yang menjawab “Tidak” berjumlah 7 orang atau 26,92%, dengan demikian dapat dipahami bahwa peralihan hak perwalian kepada wali hakim tidak disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga. Dari tabel di atas diketahui bahwa mayoritas responden menjawab “Ya” (73,08%), dengan demikian jelaslah bahwa peralihan hak perwalian kepada wali hakim dalam perkawinan, karena dilatar-belakangi oleh faktor ekonomi keluarga. Dalam hal ini, orang tua biaya untuk datang dan hadir dalam akad perkawinan

⁸ Mukhlis (KUA Kecamatan Rangsang Barat), *Wawancara*, Tanggal 18 Maret 2013.

anaknya. Karena, perjalanan yang ditempuh membutuhkan biaya besar. Karena orang tua tidak berdomisili di lingkungan Kecamatan Rangsang Barat dan sekitarnya. Hal ini sebagaimana hasil wawancara peneliti, sebagai berikut:

“Tidak hadirnya orang tua dalam perkawinan, terutama orang tua dari pengantin perempuan, karena orang tua tidak memiliki biaya yang cukup untuk datang dan menghadiri akad perkawinannya. Dalam hal ini, adanya di antara orang tua yang berdomisili jauh dari Kecamatan Rangsang, bahkan ada di antara orang (wali) dari pihak perempuan yang tinggal di luar wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti atau di luar Propinsi Riau seperti, pasangan Anda Yani dan Maryani, di mana orang tua Maryani tinggal di Propinsi Sumatera Utara”.⁹

Berdasarkan uraian di atas, sehingga terlihat jelas bahwa faktor-faktor yang melatar-belakangi peralihan hak perwalian kepada wali hakim di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti, yaitu (1) faktor budaya dalam rangka menghargai pemimpin, karena faktor ketidak-mampuan orang menjadi wali dalam akad perkawinan; (2) faktor orang tua pengantin perempuan sedang sakit keras dan tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan jauh, sehingga mereka tidak dapat hadir dalam akad perkawinan anak perempuannya, dan (3) faktor ekonomi. Hal ini yang membuat orang tua mengalami kesulitan dalam biaya transportasi keberangkatan dan menuju tempat perkawinan anaknya.

B. Ketentuan Akad Pengalihan Hak Perwalian yang diterima oleh Pihak KUA

Pada dasarnya hak untuk menjadi wali dalam perkawinan ada di tangan wali aqrab, atau orang yang diberi wasiat untuk menjadi wali. Hanya wali aqrab saja yang berhak mengawinkan perempuan yang dalam perwaliannya dengan orang lain. Demikian pula dia berhak melarangnya

⁹ Mukhlis (KUA Kecamatan Rangsang Barat), *Wawancara*, Tanggal 18 Maret 2013.

kawin dengan seseorang apabila ada sebab yang dapat diterima, misalnya suami tidak sekufu atau karena si perempuan sudah dipinang orang lain lebih dulu, atau jelek akhlaknya, atau cacat badan yang menyebabkan perkawinannya dapat di fasakhkan. Dalam hal semacam ini wali aqrab adalah yang berhak menjadi wali dan haknya tidak dapat berpindah kepada orang lain, hingga kepada klian sekalipun.

Para ulama berpendapat bahwa wali tidak boleh enggan menikahkan perempuan yang dalam perwaliannya, tidak boleh menyakitinya atau melarangnya kawin, padahal yang akan mengawininya itu sudah sekufu dan sanggup membayar maskawin. Dalam hal seperti ini, apabila walinya enggan menikahkan, maka si perempuan berhak mengadukan halnya kepada hakim untuk dinikahkan. Dalam hal semacam ini, hak wali yang enggan menikahkan ini tidak berpindah kepada wali hakim yang lebih rendah tingkatannya, tetapi langsung berpindah ke tangan hakim.

Menurut Sayuti Thalib, wali hakim adalah penguasa yang berwenang dalam bidang pernikahan, biasanya penghulu nikah atau penguasa lain dari Departemen Agama dalam hal apabila ditemui kesulitan untuk menghadirkan wali nasab atau adanya halangan dari wali nasab atas perwalian dalam pernikahan. Dalam hal ini, seorang calon pengantin perempuan dapat mempergunakan bantuan wali hakim, baik melalui pengadilan agama atau tidak, tergantung prosedur yang ditempuh.¹⁰

¹⁰ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Perempuan*, (Jakarta: UI Press, 1982), h. 65.

Berkaitan dengan masalah wali hakim, dinyatakan didalam pasal 23 KHI yang berbunyi:

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
2. Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.¹¹

Sebelumnya telah di terangkan bahwa wali anak perempuan merupakan hak dari wali aqrab yang tidak dapat berpindah kepada wali lain atau kepada penguasa, kecuali apabila ada sebab-sebab yang dapat diterima. Hal-hal yang menyebabkan hak menjadi wali dapat berpindah kepada wali hakim, yaitu (1) Apabila ada sangketa antara wali, dan (2) Apabila tidak ada wali. Hal ini dibenarkan apabila telah jelas tidak adanya wali atau wali tidak berada pada tempat.¹²

Apabila datang peminang yang sekufu, perempuannya bersedia, tetapi walinya tidak diketahui dimana berada, meskipun tidak jauh tempatnya atau wali meninggalkan kampung halamannya padahal sudah ada laki-laki yang akan memperistri, maka dalam keadaan semacam ini hakim berhak menikahkan laki-laki tersebut dengan perempuan yang tidak punya wali itu, kecuali apabila si perempuan bersedia menunggu kedatangan walinya, meskipun lama. Kalau ia tidak sabar, maka ia tidak harus menunggu kedatangan walinya. Hal demikian berdasarkan hadits Rasulullah SAW menerangkan:

¹¹ H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), h. 120.

¹² Inpres No. 1 tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: tp, tt), h. 28.

Artinya: “Tiga perkara yang tidak boleh di tunda,yaitu shalat apabila telah tiba waktunya,jenazah apabila telah hadir dan janda (orang yang tidak bersuami atau beristri) apabila telah mendapat orang yang sekufu.”(Riwayat al-Balahaqi).

Kemudian, dari hasil observasi yang dilakukan di KUA Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti, secara umum adanya peralihan hak perwalian kepada wali hakim karena orang tua sebagai wali tidak hadir dalam akad perkawinan, sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Peralihan hak perwalian kepada wali hakim merupakan suatu upaya yang dilakukan pihak KUA dalam rangka bertekad dan berkomitmen dalam mewujudkan niat baik dari kedua pasangan calon pengantin, yakni melangsungkan akad perkawinan. Dengan demikian, ketika orang tua sebagai wali perkawinan tidak hadir, maka pihak KUA bertindak sebagai wali dalam perkawinan tersebut.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa tidak hadirnya orang tua ketika akad perkawinan anak perempuannya disebabkan karena orang tua sedang menderita sakit, sehingga tidak memungkinkan untuk hadir dan menyaksikan akad perkawinan. Meskipun demikian, pihak KUA tetap melangsungkan akad perkawinan yang direncanakan oleh kedua pasangan laki-laki dan perempuan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dari tabel angket di bawah ini:

Tabel 4.8 : Sikap KUA Ketika Akad Perkawinan Yang Dilangsungkan Tanpa Dihadiri Oleh Orang Tua

No	Indikator	Responden	Persentase
1	Tetap melangsungkan akad perkawinan	17	65.38%
2	Menunda akad perkawinannya sampai hadirnya orang tua	9	34.62%
3	Tidak melaksanakan akad perkawinan sama sekali	-	-
	Jumlah	26	100.00%

Sumber: Data Sebaran Angket Penelitian, Maret 2013

Pada tabel di atas diketahui bahwa mayoritas responden (17 orang atau 65,38%) menjawab bahwa pihak KUA Kecamatan Rangsang Barat tetap melangsung akad perkawinan tanpa dihadiri oleh orang tua (wali) dari pihak perempuan. Sementara, hanya 9 orang responden atau 34,62% yang menjawab bahwa penundaan akad perkawinan dilakukan pihak KUA sampai hadir orang tua dalam akad perkawinan yang akan dilangsungkan.

Adanya responden yang menjawab bahwa penundaan yang dilakukan pihak KUA Kecamatan Rangsang Barat dari akad perkawinan ketika orang tua (wali) tidak hadir dalam perkawinan, di mana pihak KUA terlebih dahulu memastikan penyebab tidak hadirnya orang tua dalam akad perkawinan tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, di mana tidak hadirnya orang tua dalam akad perkawinan karena orang tua sedang sakit keras dan disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga itu sendiri.

Upaya yang dilakukan pihak KUA Kecamatan Rangsang Barat dalam memastikan ketidakhadiran orang tua (wali perempuan) dalam akad perkawinan dijelaskan dari tabel di bawah ini:

Tabel 4.9 : Upaya Yang Dilakukan KUA Kecamatan Rangsang Barat Dalam Memastikan Tidak Hadirnya Orang Tua Dalam Akad Perkawinan

No	Indikator	Responden	Persentase
1	Mendatangi orang tua sesuai dengan alamat yang ada	-	-
2	Menghubungi orang tua melalui via telephone atau HP, tanpa menemui orang tua secara langsung	11	42.31%
3	Menanyakan kepada calon pengantin tentang tidak hadirnya orang tua dalam akad perkawinan	15	57.69%
	Jumlah	26	100.00%

Sumber: Data Sebaran Angket Penelitian, Maret 2013

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa tidak adanya responden yang menjawab bahwa upaya KUA dalam memastikan tidak hadirnya orang tua (wali) dalam perkawinan dengan cara mendatangi secara langsung orang tua (wali) sesuai dengan alamat yang diberikan, 11 orang responden atau 42,31% menjawab bahwa upaya KUA dalam memastikan tidak hadirnya orang tua (wali) dalam perkawinan dengan cara menghubungi orang tua melalui via telephone atau HP tanpa menemuinya secara langsung, sementara 15 orang responden atau 57,69% responden menjawab bahwa upaya KUA dalam memastikan tidak hadirnya orang tua (wali) dalam perkawinan dengan cara menanyakan kepada pasangan calon suami isteri tentang faktor penyebab tidak hadirnya orang tua dalam akad perkawinan.

Dari persentase dalam tabel di atas, diketahui bahwa mayoritas responden menjawab upaya yang dilakukan pihak KUA Kecamatan Rangsang Barat dalam memastikan tidak hadirnya orang tua dalam akad perkawinan

dengan cara menanyakan kepada pasangan calon suami isteri yang akan melangsungkan akad perkawinan. Meskipun demikian, banyaknya responden menjawab upaya tersebut dilakukan dengan cara menghubungi orang tua melalui via telephone atau HP.

Tindakan KUA yang tetap melangsungkan akad perkawinan karena pihak KUA merasa yakin bahwa orang yang dihubungi melalui via telephone atau HP adalah orang tua atau wali dari kedua pasangan calon suami isteri. Hal inilah yang menjadi dasar dan alasan pihak KUA melangsungkan akad perkawinan tersebut. Dengan demikian, bila pihak KUA Kecamatan Rangsang Barat mengetahui bahwa yang dihubungi tidak benar orang tua atau wali dari pihak yang bersangkutan, maka pihak KUA tidak berani menjadi wali dan melangsungkan akad perkawinan tersebut. Karena, tidak adanya peralihan hak perwalian dari wali nasab kepada wali hakim (KUA). Sehingga, hak tersebut masih menjadi hak mutlak dari wali nasab.

Di sisi lain, secara undang-undang tindakan yang dilakukan oleh KUA yang menikahkan pasangan laki-laki dan perempuan tanpa diketahui dan mendapat persetujuan dari orang tua atau wali merupakan suatu bentuk pelanggaran yang telah dilakukan. Namun, izin tertulis dan izin secara lisan setelah pihak KUA Kecamatan Rangsang Barat menghubungi orang tua atau wali melalui telephone atau HP dapat menjadi dasar dan alasan untuk tidak terjeratnya pihak KUA dalam suatu bentuk pelanggaran tersebut.

Di samping itu, berdasarkan pada tabel 4.9 tentang upaya yang dilakukan pihak KUA dalam memastikan izin yang diberikan orang tua atau wali dalam perkawinan dari jawaban menanyakan kepada calon suami isteri

dan menghubungi pihak orang tua melalui telephone atau HP senada dengan hasil observasi peneliti peroleh di KUA Kecamatan Rangsang Barat, di mana kedua upaya di atas dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Rangsang Barat dalam memastikan tidak hadirnya orang tua (wali perempuan) dalam akad perkawinan, yakni menanyakan terlebih dahulu kepada pasangan calon suami isteri, kemudian pihak KUA Kecamatan Rangsang Barat berkomunikasi langsung melalui via telephone atau HP dengan orang tua yang bersangkutan. Kemudian, izin wali dalam perkawinan di samping bersifat tertulis dan melalui via telephone atau HP, kondisi demikian berpeluang adanya melakukan praktek penipuan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dari tabel angket di bawah ini:

Tabel 4.10: Izin Wali Dalam Perkawinan Melalui Via Telephone Atau Hp Berpeluang Terjadinya Praktek Penipuan

No	Indikator	Responden	Persentase
1	Ya	17	65.38%
2	Tidak	9	34.62%
3	Tidak tahu	-	-
	Jumlah	26	100.00%

Sumber: Data Sebaran Angket Penelitian, Maret 2013

Pada tabel di atas diketahui bahwa mayoritas responden menjawab “Ya” berjumlah 17 orang atau 65,38%, sementara responden yang menjawab “Tidak” hanya berjumlah 9 orang atau 34,62%, dan tidak ada yang menjawab “tidak tahu”. Dengan demikian dapat dipahami bahwa peralihan hak perwalian kepada wali hakim yang terjadi karena adanya izin wali melalui via *telephone* atau HP berpeluang terjadinya praktek penipuan.

Di samping itu, dari data tabel angket dalam hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa adanya responden yang menjawab bahwa peralihan hak perwalian tersebut adanya praktek dan berpeluang terjadi penipuan. Meskipun, persentase yang dihasilkan hanya kecil, akan tetapi persentase yang diperoleh adanya indikasi dan adanya peluang terjadi praktek penipuan dalam akad perkawinan yang dilangsungkan.

Praktek penipuan tersebut dilakukan oleh pasangan calon suami isteri yang ingin melangsungkan akad perkawinannya. Karena perkawinan yang ingin dilangsungkan belum mendapat izin dari orang tua. Sementara, persetujuan atau izin tersebut merupakan rekayasa yang dilakukan. Ketika pihak KUA menghubungi orang tua dari pasangan calon pengantin, ternyata yang dihubungi bukanlah orang tua mereka sesungguhnya. Tetapi, orang lain yang dimintai bantuan dan mengakui sebagai orang tua dari kedua pasangan calon pengantin. Sehingga, ketika KUA menghubungi keterangan yang diberikan sesuai dengan keterangan yang telah ditanyakan sebelumnya kepada pasangan calon penganti.

Dengan mendengarkan keterangan yang diberikan, sehingga KUA berkeyakinan bahwa meskipun pasangan calon pengantin yang melakukan akad perkawinan dan tidak dihadiri oleh orang tua, namun kondisi yang sedang dihadapi diketahui oleh orang tua yang bersangkutan dari kedua belah pihak. Meskipun, pada kenyataannya orang tua kandung dari kedua pasangan pengantin tidak mengetahui sama sekali dengan kondisi dan keadaan yang sedang dihadapi oleh anak-anak mereka.

Tujuan pasangan calon pengantin meminta bantuan kepada orang lain untuk mengaku sebagai orang tua kandung ketika dihubungi oleh pihak KUA melalui HP, di mana pasangan menginginkan agar mereka tidak mengalami hambatan dalam melangsungkan akad perkawinan. Karena, hubungan perkawinan yang ingin diikat oleh kedua pasangan calon pengantin tidaklah mendapatkan persetujuan atau restu dari kedua orang tua dari masing-masing pasangan.

Dengan demikian, bila pasangan calon pengantin tidak meminta bantuan dari pihak lain, maka sudah barang tentu akad perkawinan yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, pasangan calon pengantin memanipulasi data orang tua, walaupun sebenarnya secara administrasi nama orang tua yang tertulis adalah nama orang tua kandung yang sebenarnya dari kedua pasangan calon pengantin. Hal demikian diketahui dari hasil wawancara penelitian sebagai berikut :

“Berbagai upaya yang telah kami lakukan, semata-mata agar keinginan kami untuk melangsungkan akad perkawinan dapat terlaksana. Karena, pada dasarnya ikatan perkawinan yang kami lakukan tidaklah mendapatkan persetujuan dan restu dari kedua orang tua kami. Namun, kami meyakini bahwa meskipun saat ini akad perkawinan yang kami lakukan tidak mendapat izin dan persetujuan dari kedua orang tua, namun seiring perjalanan waktu nanti orang tua kami akan memberikan restu. Apalagi dari perkawinan kami membuahi anak dan keturunan.”¹³

Dari hasil wawancara di atas terlihat jelas dan dapat dipahami bahwa adanya indikasi penipuan yang terjadi dalam akad perkawinan juga tidak terlepas dari tekanan orang tua, di mana keinginan dari pasangan calon suami

¹³ Wati, *Wawancara*, Tanggal 02 September 2013.

dan isteri yang ingin melangsungkan akad perkawinan, tetapi pihak keluarga (orang tua) tidak menyetujui keinginan mereka dalam membina rumah tangga. Hal demikian disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Beberapa pasangan calon pengantin yang pernah melakukan akad perkawinan dengan menggunakan jasa dan bantuan dari temannya dengan tujuan supaya akad perkawinan yang ingin langsung dapat terlaksana, sebagai berikut :¹⁴.

1. Pasangan Afrizal dan Linda yang melaksanakan akad perkawinan pada tanggal 11 Januari 2011. Dari hasil wawancara yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa alasan tidak hadirnya orang tua dalam perkawinan, karena orang tua sedang sakit keras dan tidak memungkinkan untuk hadir dalam perkawinan. Oleh karena itu, ketika KUA menghubungi orang tua yang bersangkutan, di mana Afrizal dan Linda meminta bantuan kepada Hermantono untuk menjadi dan mengaku sebagai orang tua dari Afrizal dan Linda. Padahal orang tua Linda sebenarnya adalah Zaenal Husen. Namun, ketika dihubungi pihak KUA, Hermantono mengaku sebagai Zaenal Husen selaku orang tua dari Linda, dan orang tua dari Afrizal adalah Syarifuddin.¹⁵
2. Pasangan Hendri dan Wati yang melaksanakan akad perkawinan pada tanggal 23 Maret 2011. Ketika dihubungi pihak KUA, Hendri dan Wati menggunakan jasa Nasrun yang mengaku sebagai orang tua dari Wati. Padahal orang tua Wati sebenarnya adalah Abdul Shomad Rauf dan orang tua dari Hendri adalah Mustafa Husnan. Ketika dihubungi, Nasrun yang mengaku sebagai Abdul Shomad Rauf menerangkan bahwa dia merestui akad perkawinan anaknya, tetapi dia tidak memungkinkan untuk hadir karena dia sedang ada masalah keluarga yang tidak bisa ditinggal.¹⁶
3. Pasangan Feri dan Febriana, melaksanakan akad perkawinan pada tanggal 30 Maret 2011. Dalam hal ini, tidak hadirnya orang tua Febriana ketika ia melangsungkan akad perkawinan dan memintai wali hakim sebagai wali dalam perkawinan karena orang tuanya tidak memiliki biaya untuk datang ke tempat di mana ia melangsungkan akad perkawinan. Keterangan demikian diperoleh KUA ketika menghubungi Andika Muis yang

¹⁴ Data Kantor KUA Kecamatan Rangsang Barat Tahun 2011.

¹⁵ Afrizal dan Linda, *Wawancara*, 03 September 2013.

¹⁶ Hendri dan Wati, *Wawancara*, Tanggal 02 September 2013.

mengakui sebagai orang tua kandung dari Febriana. Padahal, orang tua kandung Febriana adalah H. Ibrahim Ahmad dan orang tua kandung dari Feri adalah Mahmud Hamid. Namun, ketika dihubungi melalui via HP, pihak KUA sedang berbicara dengan H. Ibrahim Ahmad, ternyata pihak KUA memperoleh keterangan dari Andika Muis yang mengakui sebagai H. Ibrahim Ahmad.¹⁷

Hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa ketika KUA menghubungi wali atau orang tua, di mana KUA tidaklah berbicara dan berkomunikasi dengan wali atau orang tua dari pasangan calon pengantin. Melainkan, orang yang telah diminta bantuannya dalam melancarkan akad perkawinan yang ingin dilaksanakan. Dari hasil komunikasi lewat HP tersebut, KUA beranggapan bahwa akad perkawinan yang ingin dipimpin dan dilaksanakan di Kantor KUA sudah diketahui oleh orang tua dari kedua pasangan calon pengantin. Namun, kenyataannya orang tua tidak mengetahui sama sekali akan peristiwa dan kejadian tersebut.

Di samping itu, adanya peluang dan indikasi praktek penipuan dari akad perkawinan yang dilaksanakan dari sebagian pasangan calon suami isteri di Kecamatan Rangsang Barat. Hal demikian juga sebagaimana dijelaskan dalam hasil wawancara berikut :

“Pengalihan hak perwalian kepada wali hakim berpeluang terjadinya praktek penipuan dalam pemberian izin perkawinan yang dikeluarkan oleh orang tua atau wali. Praktek penipuan ini disebabkan karena perkawinan yang dilakukan tidak diketahui dan mendapat izin dari orang tua atau wali. Karena, tanpa disengaja sebelum akad perkawinan dilakukan pasangan suami isteri telah melakukan suatu tindakan yang melanggar nilai agama dan etika di masyarakat. Sehingga, pihak keluarga (terutama orang tua) mengecam tindakan tersebut dan tidak merestui perkawinan yang dilakukan. Namun, antara pasangan calon suami isteri sudah saling mencintai dan bertekad untuk melanjutkan hubungan ke jenjang perkawinan, sehingga satu-satunya jalan yang ditempuh dengan cara melakukan penipuan atau manipulasi data orang tua atau wali”.¹⁸

¹⁷ Feri dan Febriana, *Wawancara*, Tanggal 05 September 2013.

¹⁸ Anda Yani, *Wawancara*, Tanggal 21 Maret 2013.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, jelaslah bahwa adanya praktek penipuan, karena perkawinan yang dilangsungkan tidak diketahui dan mendapat restu dari kedua orang tua. Adapun orang tua tidak memberikan izin dan restu dari perkawinan tersebut, karena pelanggaran nilai agama dan etika yang ada di masyarakat. Dengan demikian, bila pelanggaran tersebut tidak dilakukan, maka orang tua atau wali akan merestujui dan memberikan izin akad perkawinan yang dilakukan.

Setelah akad perkawinan dilakukan dan selesai meskipun sebelumnya tidak diketahui dan mendapat persetujuan dari orang tua atau wali, kemudian setelah akad perkawinan tersebut diketahui oleh pihak keluarga (orang tua atau wali), kemudian pihak keluarga (orang tua atau wali) melakukan akad perkawinan ulang. Karena, akad perkawinan yang telah dilakukan sebelumnya dianggap tidak sah dan tidak memenuhi rukun syarat dalam perkawinan, yakni adanya wali perkawinan. Meskipun, wali dalam perkawinan ada (menggunakan wali hakim), akan tetapi wali nasab tidak pernah memberikan peralihan hak perwalian dari perkawinan tersebut. Hal ini sebagaimana hasil angket dalam tabel berikut:

Tabel 4.11: Wali Melakukan Akad Perkawinan Ulang Setelah Mengetahui Akad Perkawinan Yang Tidak Mendapat Izin Dari Orang Tua Atau Wali

No	Indikator	Responden	Persentase
1	Ya	23	100.00%
2	Tidak	-	-
3	Tidak tahu	-	-
	Jumlah	26	100.00%

Sumber: Data Sebaran Angket Penelitian, Maret 2013

Dari tabel di atas, diketahui bahwa keseluruhan dari responden (26 atau 100,00%) menjawab “Ya”, sementara tidak ada di antara responden yang menjawab “tidak” atau “tidak tahu”. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa orang tua melakukan akad perkawinan ulang. Ketika anaknya telah melangsung akad perkawinan dengan menggunakan wali hakim dari perkawinan yang tidak diketahui dan mendapatkan persetujuan dari orang tua sebelumnya.

Adapun tindakan melakukan perkawinan ulang dari akad perkawinan yang sudah dilakukan tanpa persetujuan dan izin orang tua atau wali sebelumnya, karena orang tua atau wali menilai bahwa akad perkawinan sebelumnya tidak sah dan belum memenuhi persyaratan serta ketentuan yang telah ditetapkan dalam Islam. Kemudian, pihak keluarga khawatir ketika perkawinan tidak sah dan tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Islam, hal ini akan berdampak terhadap perjalanan dan kehidupan keluarga dari anak-anak mereka di kemudian hari, seperti pergaulan suami isteri, memperoleh keturunan, dan lain sebagainya.

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengalihan Hak Perwalian kepada Wali Hakim

Pada bab III telah dijelaskan bahwa data yang terkumpul dengan menggunakan teknik pengumpulan data, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif, yaitu dengan jalan mengklasifikasikan data-data yang dikumpulkan di lapangan berdasarkan persamaan jenis. Kemudian data tersebut dianalisis dan diuraikan secara gamblang sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

Selanjutnya, setelah data yang diuraikan secara gamblang sehingga diperoleh gambaran utuh dari hasil penelitian, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan kaca mata hukum Islam. Adapun pedoman dalam melakukan analisis berdasarkan kaca mata hukum Islam, peneliti berupaya menganalisis data yang ada dan senantiasa selalu berpedoman kepada sumber dan dalil-dalil syara' (hukum Islam).

Dari berbagai literatur ditemukan bahwa sumber hukum Islam digali dari al-Quran dan Sunnah, sementara dalil-dalil syara' dapat dilihat dari keabsahaannya, yakni disepakati atau tidak disepakati. Adapun dalil hukum Islam yang disepakati di kalangan para ulama, yaitu al-Qur'an dan Sunnah, Ijma' dan Qiyas. sementara dalil-dalil dari hukum Islam yang tidak disepakati, *Istihsan, Maslahah mursalah, Istishab, 'Urf* (adat dan tradisi), *Syar'u man Qablana, Mazhab Shahabi, Sadd az-Zari'ah*.¹⁹

Berdasarkan sumber dan dalil-dalil syara' di atas, dalam menganalisis data yang diperoleh dari penelitian, peneliti berpedoman kepada sumber dan dalil-dalil syara' yang disepakati (al-Quran, as-Sunnah, Ijma' dan Qiyas), kemudian merujuk kepada kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama serta berbagai artikel yang memiliki hubungan erat dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Di samping itu, berdasarkan data yang diperoleh dan diuraikan pada bagian terdahulu, maka dalam melakukan analisis hukum Islam dapat dilakukan dari dua aspek utama, sebagai berikut:

¹⁹ <http://iimazizah.wordpress.com/2011/04/05/sumber-hukum-islam/>

1. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi terjadi Pengalihan Hak Perwalian kepada Wali Hakim dalam Perkawinan di KUA Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dari uraian sebelumnya, maka ada beberapa faktor yang melatarbelakangi peralihan hak perwalian kepada wali hakim di KUA Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti, yaitu:

a. Faktor menghormati pemimpin (KUA).

Secara undang-undang KUA merupakan representatif dari pemimpin. Karena, diangkat dan dipilih oleh pemimpin atau penguasa. Dengan demikian, menyerahkan hak perwalian kepada wali hakim merupakan suatu tindakan dinilai baik oleh sebagai besar masyarakat. Sehingga sebagian besar masyarakat di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti meminta wali hakim sebagai wali perkawinan anak perempuannya.

b. Faktor orang tua merasa takut dan khawatir merasa salah dalam melangsungkan akad perkawinan.

Faktor ini merupakan salah satu faktor yang melatarbelakangi banyaknya masyarakat di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti meminta wali hakim (KUA) sebagai wali dalam perkawinan anak perempuannya. Karena, orang tua merasa tidak percaya diri dan berani dalam memimpin akad perkawinan yang dilangsungkan. Dengan demikian, orang tua khawatir akad perkawinan yang dilaksanakan tertunda-tunda.

c. Faktor orang tua menderita sakit

Dalam hal ini, peralihan hak perwalian disebabkan orang tua sebagai wali terutama orang tua (wali) bagi calon pengantin perempuan menderita sakit keras, dan tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan jauh. Karena, orang tua (wali) berdomisili di luar Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.

d. Faktor ekonomi

Dari faktor penyebab orang tua tidak dapat hadir dalam akad perkawinan anaknya terutama orang tua dari pihak perempuan karena orang tua tidak memiliki biaya. Sebab, Karena, perjalanan yang ditempuh dari tempat orang tua tinggal dengan tempat dilangsungkan akad perkawinan anaknya membutuhkan biaya yang besar. Pasangan calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan melangsung akad perkawinan di tempat dan lingkungan mereka bekerja.

Berdasarkan faktor di atas, ketika peralihan hak perwalian kepada wali hakim karena tidak hadirnya orang tua (wali) pada akad perkawinan seperti orang tua sedang sakit keras atau kondisi ekonomi (sebagaimana di atas), maka peralihan hak perwalian tersebut sesuatu yang dibolehkan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 dijelaskan bahwa

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.

2. Dalam hal wali *adlal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.²⁰

Berdasarkan Inpres No. 1 tahun 1991, diterangkan bahwa wali bagi anak perempuan merupakan hak dari wali aqrab yang tidak dapat berpindah kepada wali lain atau kepada penguasa, kecuali apabila ada sebab-sebab yang dapat diterima. Hal-hal yang menyebabkan hak menjadi wali dapat berpindah kepada wali hakim, yaitu (1) Apabila ada sangketa antara wali, dan (2) Apabila tidak ada wali. Hal ini dibenarkan apabila telah jelas tidak adanya wali atau wali tidak berada pada tempat.²¹

Dari uraian di atas dapat dipahami ada beberapa sebab terjadinya peralihan hak perwalian kepada wali hakim, di antaranya tidak adanya wali dalam perkawinan. Dengan demikian, jelaslah perpindahan hak perwalian karena sebab wali nasab tidak hadir pada saat akad perkawinan berlangsung yang disebabkan oleh orang tua sakit atau faktor ekonomi yang dimiliki merupakan suatu dasar dari peralihan hak perwalian kepada wali hakim. Hal ini juga berdasarkan kepada dalil-dalil syara' sebagai berikut:

"Dari Abu Burdah Ibnu Abu Musa, dari ayahnya Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: Tidak sah nikah kecuali ada wali" (HR. Abu Dawud).²²

²⁰ H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), h. 120.

²¹ Inpres No. 1 tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: tp, tt), h. 28.

²² Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz. 2, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), h. 229.

“Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: "Seorang janda lebih berhak menentukan (pilihan) dirinya daripada walinya dan seorang gadis diajak berembuk, dan tanda izinnya adalah diamnya." Riwayat Imam Muslim. Dalam lafaz lain disebutkan, "Tidak ada perintah bagi wali terhadap janda, dan anak yatim harus diajak berembuk." (HR. Abu Dawud).²³

Berdasarkan hadits di atas, dapat dipahami ketika suatu perkawinan antara laki-laki dan perempuan tidak dapat mendatangkan wali (orang tua) karena sebab-sebab yang diperolehkan oleh syara' (sakit atau kondisi ekonomi) atau dari pasangan tidak adanya wali sama sekali, maka penguasa-lah yang bertindak sebagai wali dalam perkawinan tersebut.

Namun, ketika wali ada dan wali merasa khawatir salah dalam pelafalan akad perkawinan atau dalam rangka menghormati menjadi sebab dari peralihan hak perwalian dari wali nasab kepada wali yang lain, maka peralihan hak perwalian tersebut sesuatu yang tidak dibenarkan. Karena, sebagaimana telah ditetapkan oleh hukum Islam dan dijelaskan oleh para ulama, bahwa hak perwalian dalam perkawinan merupakan hak dari wali aqrab (wali yang urutan terdekat), bukan wali hakim, kecuali wali aqrab sebagaimana dijelaskan di atas atau wali aqrab tidak memenuhi persyaratan sebagai seorang wali.

Dengan demikian, dalam perspektif hukum Islam pihak KUA Kecamatan Rangsang Barat tidak melakukan suatu pelanggaran yang ditetapkan dalam hukum Islam, akan tetapi pelanggaran tersebut hanya dilakukan oleh pasangan calon suami isteri. Dari perkawinan demikian, akan melahirkan suatu kemudharatan, yakni hubungan suami isteri yang

²³ *Ibid*

tidak halal (hubungan perzinahan), ketika dari hubungan tersebut dikaruniai anak, maka anak yang dilahirkan merupakan anak hasil dari perzinahan.

Adanya praktek penipuan dilakukan calon pengantin laki-laki dan perempuan yang dibantu oleh orang-orang terdekat mereka yang bukan wali ketika dihubungi melalui via telephone atau HP suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum Islam, karena pada hakikatnya tidak terjadi peralihan hak perwalian kepada wali hakim. Karena ketika penyerahan hak perwalian pada saat pihak KUA Kecamatan Rangsang Barat menghubungi melalui via telephone atau HP tidak orang yang memiliki hak, bukan orang tua atau wali aqrab. Akan tetapi, orang lain yang tidak ada hak sama sekali dalam perwalian tersebut.

2. Upaya yang dilakukan KUA dalam pengalihan hak Perwalian kepada Wali Hakim Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dalam uraian di atas diketahui bahwa ketentuan dari peralihan hak perwalian kepada wali hakim di KUA Kecamatan Rangsang Barat merupakan suatu peralihan yang dibolehkan. Karena, pihak KUA tidak bersikap tergesa-gesa dalam mengambil dan melakukan suatu keputusan, yakni menikahkan pasangan laki-laki dan perempuan ketika orang tua (wali) tidak ada dalam akad perkawinan berlangsung.

Dibenarkannya tindakan KUA Kecamatan Rangsang Barat menjadi wali dari pasangan calon suami isteri yang tidak ada wali, melihat dari upaya yang dilakukan pihak KUA sebelumnya, yakni menanyakan kepada

pasangan calon suami isteri terlebih dahulu penyebab orang tua atau wali tidak hadir dalam perkawinan yang dilangsungkan. Selanjutnya, untuk memastikan jawaban yang diberikan oleh pasangan calon suami isteri tersebut, pihak KUA Kecamatan Rangsang Barat langsung menghubungi orang tua dari kedua pasangan calon suami isteri melalui via telephone atau HP.

Dari komunikasi yang berlangsung, pihak KUA menanyakan tentang persetujuan secara tertulis yang diberikan dan merupakan persyaratan administrasi yang telah harus dilengkapi sebelum akad perkawinan dilaksanakan. Ketika izin yang diberikan benar berasal dari orang tua (wali) dari kedua pasangan calon suami isteri, kemudian tidak hadirnya orang tua atau wali disebabkan karena faktor-faktor yang dibenarkan oleh hukum Islam, hal ini dapat menjadi dasar dari peralihan hak perwalian kepada wali hakim.

Namun, yang jelas ketika orang tua (wali) terutama orang tua dari pihak calon pengantin perempuan tidak hadir karena faktor-faktor yang dibenarkan oleh hukum Islam, selanjutnya pihak KUA meminta izin kepada orang tua atau wali aqrab untuk menggantikan posisinya sebagai wali dalam perkawinan anak perempuan. Adapun keinginan dan komitmen yang besar dari pihak KUA Kecamatan Rangsang Barat mewakili orang tua (wali aqrab) sebagai wali dalam perkawinan (wali hakim), sesuai dengan seruan Rasulullah SAW di dalam sabdanya yang berbunyi:

لا يؤخر الصلاة إذا حضرت والأيم إذا وجدت نفا (رواه البيهقي)

Artinya: “Tiga perkara yang tidak boleh di tunda, yaitu shalat apabila telah tiba waktunya, jenazah apabila telah hadir dan janda (orang yang tidak bersuami atau beristri) apabila telah mendapat orang yang sekufu.” (HR. al-Baihaqiy).²⁴

Di sisi lain, bila dari persetujuan atau izin yang diberikan melalui via telephone atau HP adanya suatu rekayasa sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka dalam hal ini yang melakukan suatu pelanggaran adalah pihak yang bersangkutan, yakni calon pengantin dan pihak-pihak yang membantunya dalam melakukan praktek penipuan tersebut. Sementara, pihak KUA tidak terlibat dalam pelanggaran yang dilakukan. Secara prinsip, pihak KUA Kecamatan Rangsang Barat senantiasa selalu berupaya dan bertekad melakukan suatu tindakan sesuai ketentuan yang digariskan dalam hukum Islam dan prosedural serta ketentuan yang berlaku dalam undang-undang.

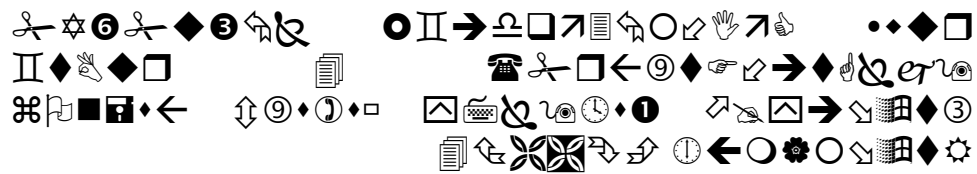
Kemudian, tekad dan keinginan dari KUA Kecamatan Rangsang Barat dalam melaksanakan sunnah Nabi SAW yakni perkawinan, serta berupaya untuk menghindari berbagai kemudharatan dan meminimalisir peluang kemudharatan yang terjadi, baik pelanggaran terhadap ketentuan yang digariskan dalam hukum Islam maupun ketentuan yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Karena, menghindari kemudharatan merupakan suatu tindakan yang diutamakan dan harus dilakukan. Hal ini sebagai kaidah syara’ yang berbunyi:

²⁴ Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali bin Abdullah al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1425 H), h. 33.

ولا ضرار (قاعدة فقهية)

Artinya: “Janganlah memudharatkan dan jangan pula dimudharatkan”.²⁵

Keutamaan menghindari kemudharatan, banyak dalil al-Quran yang memberikan peringatan tentang hal itu, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah [2] ayat 231 yang berbunyi :



Artinya: “....Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, Karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.”²⁶

Allah SWT juga berfirman dalam surat al-Baqarah [2] ayat 233 yang berbunyi :



Artinya: “.....Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya...”²⁷

Kemudian, dalam upaya menghindari kemudharatan dapat juga dari sabda Nabi SAW yang berbunyi:

الا خَيْرَ حَرَّمَ اللهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ دَمَهُ وَمَالَهُ وَعِرْضَهُ وَأَنْ لَا يُظَنَّ

²⁵ H. Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), h. 42.

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005), h. 35

²⁷ *Ibid*, h. 37.

Artinya: “Allah mengharamkan dari orang mukmin, darahnya, hartanya dan kehormatannya, dan tidak menyangka kecuali dengan sangkaan yang baik”. (HR. Muslim)²⁸

Artinya: “Sesungguhnya darah-darah kamu semua, harta-harta kamu semua, dan kehrmatan kamu semua adalah haram di antara kamu semua”. (HR. Muslim)²⁹

Dari dalil-dalil di atas dapat dipahami bahwa Islam sangat mengajurkan kepada setiap mukmin untuk menghindari sesuatu yang memudharatkan dan larangan berlaku kemudharatan kepada orang lain. Dengan demikian, keinginan dan tekad yang kuat dari pihak KUA Kecamatan Rangsang Barat dalam menghindari kemudharatan baik kemudharatan bagi dirinya seperti adanya tuntutan di kemudian hari orang tua atau wali peralihan hak perwalian; atau kemudharatan yang diterima oleh pasangan calon suami isteri hasil dari tindakan penipuan yang dilakukan, yakni hubungan suami isteri yang tidak halal (zina), dan bila dikaruniai anak dari perkawinan yang dilakukan, memperoleh dari hasil perzinahan, karena perkawinan yang dilakukan tidak memenuhi syarat dan rukun dalam perkawinan.

Setelah melakukan deskripsi dari data-data yang dari lokasi penelitian, kemudian dianalisis sesuai dalam perspektif hukum Islam dari peralihan hak perwalian kepada wali hakim melalui telephone atau HP di

²⁸ Imam Nawawi, *Terjemahan Shaheh Muslim*, Jilid. 2, (Kuala Lumpur: Klang Book Centre, 1990), h. 26.

²⁹ *Ibid*, h. 31.

KUA Kecamatan Rangsang Barat, maka status hukum dari peralihan perwalian tersebut perlu dilakukan klasifikasi dari praktek yang dilakukan, yaitu dari faktor-faktor yang melatarbelakangi peralihan hak perwalian kepada wali hakim, dan ketentuan akad peralihan hak perwalian yang diterima oleh pihak KUA Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti, dapat penulis analisis bahwa suatu tindakan yang harus dihindari dan bertentangan dengan konsep hukum Islam, bila faktor peralihan hak perwalian karena kebiasaan menghormati pemimpin, sementara wali aqrab secara hukum tidak cacat dan memenuhi berbagai persyaratan menjadi seorang wali dalam perkawinan.

Kemudian, suatu tindakan yang harus dihindari dan bertentangan dengan konsep hukum Islam, ketika orang tua (wali bagi perempuan) tidak mahu menjadi wali, karena takut dan khawatir salah dalam pelafalan ijab dan qabul. Karena, ijab dan qabul merupakan momentum dari penyerahan tanggung jawab orang tua terhadap anak perempuannya, sehingga bila ijab dan qabul dilakukan sah, maka tanggung jawab atas anak perempuan berpindah kepada suaminya (menantu).

Selanjutnya, suatu tindakan yang dibolehkan dan dibenarkan menurut hukum Islam, bila peralihan hak perwalian kepada wali hakim karena faktor ekonomi yang dimiliki orang sehingga orang tua tidak memiliki biaya (karena biaya besar) untuk datang menjadi wali dalam akad perkawinan anaknya.

Namun, dalam kondisi demikian pelaksanaan akad perkawinan dapat dicari jalan keluar agar orang tua dapat menjadi wali dalam perkawinan tersebut, yakni melakukan akad perkawinan di tempat di mana orang tua pihak perempuan berdomisili. Karena, dalam perkawinan wali yang mesti ada adalah wali dari pihak perempuan, dan dibolehkan tidak hadirnya orang tua dari pihak laki-laki. Karena, pada saat ijab dan qabul pelafalannya dilakukan antara orang tua (wali perempuan) kepada pengantin laki-laki, dan bukan sebaliknya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian tentang pengalihan hak perwalian kepada wali hakim melalui telephone atau HP di KUA Kecamatan Rangsang Barat, sehingga ditarik kesimpulan bahwa:

1. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadi pengalihan hak perwalian dalam perkawinan di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti, yakni karena faktor menghormati pemimpin, faktor takut dan khawatir salah dalam melfalkan ijab dan qabul, faktor orang tua menderita sakit dan faktor ekonomi.
2. Upaya yang dilakukan pihak KUA ketika orang tua tidak hadir dan tidak menjadi wali dalam perkawinan anaknya, yakni menanyakan kepada pasangan calon pengantin tentang ketidakhadirannya orang tua atau wali, kemudian pihak KUA menghubungi orang tua dari kedua pasangan calon pengantin melalui via HP atau telephon tentang alasan tidak hadir dalam akad perkawinan tersebut.
3. Dalam perspektif hukum Islam pihak KUA Kecamatan Rangsang Barat tidak melakukan sesuatu yang melanggar ketentuan hukum Islam, akan tetapi pelanggaran tersebut hanya dilakukan oleh pasangan calon suami isteri.

B. Saran-saran

Adapun saran dalam penelitian ini disampaikan kepada:

1. Masyarakat; diharapkan penelitian ini dapat membuka cakrawala pemikiran dan menjadi informasi dalam peralihan hak perwalian kepada wali hakim, sehingga di masa mendatang hendaklah senantiasa selalu berpedoman kepada tuntunan yang disyari'atkan oleh Allah SWT dan Rasul SAW, dengan cara mengkaji kitab-kitab fiqih tentang masalah perkawinan, di antaranya dalam masalah perwalian. Dengan demikian, hal-hal yang mengakibatkan murka-Nya Allah SWT dapat ditinggalkan dan dihindari.
2. Ulama, Tokoh Masyarakat dan KUA; diharapkan penelitian ini dapat menjadi pedoman dan dasar bagi Ulama dan Tokoh Masyarakat untuk memberikan pencerahan, sehingga masyarakat dalam melakukan sesuatu benar-benar berdasarkan kepada ketentuan yang disyariatkan dalam hukum Islam di antaranya dalam masalah perwalian dalam perkawinan. Dengan demikian, tujuan dari akad perkawinan (sakinah, mawaddah dan rahmah) dapat dicapai, karena akad perkawinan yang dilakukan sah; memenuhi syarat dan rukun dalam perkawinan, bukan melakukan akad yang bathil yang semestinya tidak terakad.
3. Penguasa atau Pemerintah; diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan kepada penguasa atau pemerintah akan berperan aktif dalam pelaksanaan aturan Allah SWT dan Rasul-Nya; dalam hal ini penguasa atau pemerintah harus melakukan kontrol dan pengawasan serta menetapkan sanksi yang tegas dari pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah SWT, di antaranya sanksi yang tegas dari praktek penipuan yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakr Jabir al-Jazairi. *Ensiklopedi Muslim* (terj). Fadhli Bahri. Bekasi: Darul Falah. 2009.
- Ahmad Kamil. *Asas-asas dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 dalam Kapita Selakta Hukum Perdata Agama dan Penerapannya*. Jakarta: Makamah Agung RI. 2004
- Departemen Agama Republik Indonesia. *al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Syamil Cipta Media. 2005.
- _____. *al-Quran dan Terjemahan*. Jakarta: Syamil Cipta Media. 2005.
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Surabaya: Pustaka Tinta Emas. 1990.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1990.
- Dessy Anwar. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Surabaya: Karya Abditama. 2001.
- Hafizh Abdurrahman. *Diskursus Islam Politik dan Spiritual*. Jakarta: Wadi Press. 2002.
- Imam Nawawi. *Terjemahan Shaheh Muslim*. Jilid. 2. Kuala Lumpur: Klang Book Centre. 1990.
- M. Rifa'I. *Fiqh Islam Lengkap*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 1996.
- Masjfuk Zuhdi. *Masail Fiqhiyyah*. Jakarta: Haji Masagung. 1992.
- Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Mughirah Al-Bukhari Abu Abdullah. *al-Jamii'u al_Musnad al-Shaheh al-Mukhtashor min Umuuri Rasul SAW wa Sunnaahihi wa Ayyaamihi*. Masykul: Dar Thoq al-Najaah. 1422 H.
- Muslim Bin al-Hajj Abu al-Husin al-Qasyiriy al-Naisaburiy. *Shaheh Muslim*, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabiyy, t.th.
- Sayuthi Ali. *Metode penelitian Agama Pendekatan Teori dan Praktek*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2002.
- Sugiono. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2004.

Syaikh Hasan Ayyub. *Fikih Keluarga* (terj). M. Abdul Ghofar. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2001.

Syamsul Hadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2006.

Tim Redaksi Fokus Media. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Fokus Media. 2005.